

MEWUJUDKAN KEADILAN KONSTITUSIONAL BAGI FAKIR MISKIN

(Bantuan Hukum Perspektif Hukum Islam)



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

INDA ARESKHA

NPM 1321020090

Program Studi : Siyasah

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1438/2017

**MEWUJUDKAN KEADILAN KONSTITUSIONAL FAKIR MISKIN
(Bantuan Hukum Perspektif Hukum Islam)**

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh:

Inda Areskha

Npm : 1321020090

Program Studi : Siyasah

Pembimbing I : Drs. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

14378 H/ 2017

ABSTRAK

MEWUJUDKAN KEADILAN KONSTITUSIONAL FAKIR MISKIN (Bantuan Hukum Perspektif Hukum Islam)

Negara hukum (*Rechtsstaat*) mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum harus diimbangi pula dengan persamaan perlakuan untuk memperoleh pembelaan dari seorang advokat karena hal tersebut merupakan hak asasi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, begitupun didalam Islam yang memiliki prinsip persamaan, semua warga negara memiliki persamaan hak-hak yang sempurna, tanpa memandang warna kulit, suku bangsa dan bahasa. Semua orang memiliki kedudukan yang sama dan memiliki hak yang sama untuk mendapat keadilan.

Permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini yakni bagaimana pandangan hukum positif mengenai pentingnya pemberian bantuan hukum dalam mewujudkan keadilan konstitusional fakir miskin dan bagaimana hukum Islam memandang pentingnya pemberian bantuan hukum. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah ingin mengkaji tentang pentingnya pemberian bantuan hukum dalam mewujudkan keadilan konstitusional fakir miskin dan menganalisis pandangan hukum Islam tentang pentingnya pemberian bantuan hukum dalam mewujudkan keadilan.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian "*library research*". Sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Data diambil dari dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen yaitu data yang diteliti dalam suatu penelitian dapat berwujud data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan bantuan hukum, serta data dianalisis dengan menggunakan yuridis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum menjadi salah satu hal penting dalam mewujudkan keadilan konstitusional fakir miskin karena dengan bantuan hukum sistem peradilan dapat berjalan dan berproses secara adil. Bantuan hukum menjadi upaya terbaik yang dimiliki oleh tersangka dan terdakwa untuk dapat mendapatkan keadilan. Bantuan hukum yang efektif merupakan syarat yang esensial untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan yang baik. Bantuan hukum yang menjadi salah satu bagian penting dari konsekuensi sebagai negara hukum .



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. Endro Suratmin I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skri

**BANTUAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN
KEADILAN KONSTITUSIONAL BAGI FAKIR
MISKIN**

Nama Mahasiswa

Inda Areskha

NPM

1321020090

Jurusan

Siyasah

Fakultas

Syari'ah dan Hukum

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.**

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Mohammad Rusli, M.Ag
NIP.195902151986031004

Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum
NIP.197005022000032001

Mengetahui

Ketua Prodi Siyasah

Drs. Susiadi, AS., M.Sos.I
NIP.195808171993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. Endro Suratmin I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **MEWUJUDKAN KEADILAN KONSTITUSIONAL
FAKIR MISKIN (Bantuan Hukum Persfektif Hukum Islam)** disusun oleh :
INDA ARESKHA, NPM : 1321020090, Jurusan : Siyasah, telah diajukan dalam
sidang Munaqosah pada hari/tanggal : Rabu, 25 Oktober 2017

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Franki, M.Si.

Sekretaris : Hendriyadi, SHI., MHI.

Penguji I : Eti Karini, S.H., M.Hum.

Penguji II : Drs. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Alamsyah, M.Ag
NIP.197009011997031002

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ
تَلَوْا أَوْ تَعَرَّضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan” (QS. An Nisaa’ : 135).¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia), hlm100.

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang lebih indah selain rasa syukur penulis kepada Allah SWT, pemberi segala rahmat bagi setiap makhluknya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis persembahkan hasil karya kecil nan sederhana ini kepada orang-orang yang aku cintai dengan harapan aku mencintai mereka seperti Allah mencintai mereka.

1. Ayahanda tercinta Bandi.S yang telah sangat berjasa dalam hidupku, mengajarku, membimbingku, mendorong dan menasehati serta mendo'akanku dalam segala hal.
2. Ibunda tersayang Umayah yang tiada pernah hentinya selama ini memberikan semangat, doa, dukungan dan kasih sayang hingga aku mampu sampai pada tahap ini.
3. Kakak-kakak ku dan adikku Vicky Andreas Fiqrullah, Elma Fisilia, dan Ihza Mahendrawan, serta kakak iparku Omah dan Dedi Supriyadi atas kasih sayang dan pengertian serta senantiasa mendukung studiku.
4. Sahabat-sahabatku, Nanik Priyanti, Aziza Aziz Rahmaningsih, Choirunnisa, Luciyana Andrian S, Ariza Rahmawati, Dian Kartika, Elza Surliyanti, Rani Yusniar, serta rekan-rekan seperjuangan yang telah banyak membantu dalam penulisan karya ilmiah ini dan keberhasilanku.
5. Sahabat-sahabat eifivei ku, Selva Riana Tami, Novia Agustin, Lara Anggraini, Desi Puspita, Linda Tri Yunita, dan Oki Putra yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan yang tiada henti kepadaku.

6. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidikku menjadi seorang yang lebih maju.
7. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang juga turut berjasa dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis sangat menyadari masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, itu semua karena keterbatasan kemampuan ilmu yang penulis miliki, oleh karena itu sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki skripsi ini supaya menjadi lebih baik lagi.

Akhir kata, kepada Allah SWT penulis memohon rahmat dan ampunan, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih dalam upaya perkembangan ilmu pengetahuan, Aamiin..



Bandar Lampung, 28 Agustus 2017

Penulis

Inda Areskha

RIWAYAT HIDUP

Inda Areskha dilahirkan di Fajar Bulan Lampung Barat pada tanggal 13 Agustus 1996, anak ketiga dari empat bersaudara, buah hati perkawinan pasangan Bapak Bandi dan Ibu Umayah.

Pendidikan yang pernah penulis tempuh yang pertama yaitu Taman Kanak-Kanak Citra Dharma dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2000. Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Dasar di SDN 01 Fajar Bulan selama enam tahun yaitu dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2006. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah di SMPN 01 Way Tenong selama tiga tahun yaitu dari tahun 2006 sampai dengan 2009. Setelah taman di pendidikan menengah pertama, penulis menempuh pendidikan menengah atas di SMAN 01 Way Tenong selama tiga tahun yaitu mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, yakni Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil program studi Siyasah pada Fakultas Syari'ah.

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang indah selain rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Bantuan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Konstitusional Fakir Miskin” dapat diselesaikan. Salawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) jurusan Siyasah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu syari’ah.

Atas bantuan pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Bapak Drs. Susiadi AS., M.Sos.I. selaku Ketua Jurusan Siyasah yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.
3. Bapak Drs. H. Mohammad Rusfi, M.Ag. dan Ibu Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
4. Bapak dan Ibu Dosen, serta Staf Karyawan Fakultas Syari’ah.
5. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Universitas yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.

6. Sahabat seperjuangan Siyasah A yang telah banyak memberikan banyak masukan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, hal itu tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan data yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi penulisan ini.

Akhirnya, diharapkan karya tulis ini (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 13 September 2017

Penulis,

Inda Areskha



DAFTAR ISI

HALAM JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian	10
BAB II BANTUAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DALAM ISLAM	
A. Bantuan Hukum Perspektif Hukum Islam	
1. Pengertian Bantuan Hukum dalam Islam	15
2. Sejarah Bantuan Hukum dalam Islam	20
3. Landasan Hukum Bantuan Hukum dalam Islam	22
4. Tujuan Bantuan Hukum dalam Islam	25
B. Teori Keadilan dalam Islam	28
BAB III BANTUAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DALAM HUKUM POSITIF	
A. Keadilan dalam UUD 1945	37
B. Bantuan Hukum dalam Hukum Positif	

1. Bantuan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	39
2. Sejarah Singkat Bantuan Hukum.....	42
3. Tujuan dari Pemberian Bantuan Hukum.....	59
4. Hak Fakir Miskin untuk Mendapat Bantuan Hukum.....	61

**BAB IV PENTINGNYA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN
KONSTITUSIONAL FAKIR MISKIN**

A. Analisis Pola Hukum Positif Mengenai Pentingnya Pemberian Bantuan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Konstitusional Fakir Miskin.....	66
B. Analisis Pola yang Digunakan Hukum Positif dalam Mewujudkan Keadilan Konstitusional Fakir Miskin Apakah Sesuai dengan Hukum Islam.....	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memahami judul skripsi ini, penulis akan terlebih dahulu mengemukakan beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini adapun judul skripsi ini adalah : **“Mewujudkan Keadilan Konstitusional bagi Fakir Miskin (Bantuan Hukum persfektif Hukum Islam)”** Adapun hal-hal penting yang berhubungan dengan judul tersebut sebagai berikut:

Keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesama sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.¹

Hak Konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.²

Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak

¹ John Rawls, *Teori Keadilan*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm 6.

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 152.

mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.³

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.⁴

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukala yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam.⁵

Jadi yang dimaksud dengan Mewujudkan Keadilan Konstitusional bagi Fakir Miskin (bantuan hukum perspektif hukum Islam) adalah memecahkan dan menguraikan suatu materi atau informasi tentang bagaimana peran dari bantuan hukum dalam mewujudkan keadilan konstitusional bagi masyarakat miskin dilihat pula dalam perspektif hukum islam.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan-alasan yang mendorong dipilihnya judul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

Menganalisis bagaimana peran bantuan hukum dalam mewujudkan hak konstitusional fakir miskin. Karena Bantuan Hukum memiliki andil yang besar dalam pengenalan dan pembelaan atas hak asasi manusia serta pemberian pembelaan terhadap hak rakyat.

³ Undang –Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 1 ayat (1).

⁴ Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 ayat (1).

⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2009), hlm. 6.

Memahami dan memperluas wawasan terkait masalah peran bantuan hukum dalam mewujudkan hak konstitusional fakir miskin perspektif hukum Islam serta menambah pemahaman tentang pentingnya pemberian bantuan hukum terhadap terwujudnya hak asasi manusia.

2. Alasan Subjektif

Alasan Subjektif yang mendasari dipilihnya judul ini adalah bahwa masyarakat banyak yang tidak paham bahkan tidak mengetahui tentang pentingnya pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum terhadap terwujudnya hak asasi manusia terutama bagi kalangan masyarakat menengah kebawah (masyarakat miskin).

Permasalahan ini masih belum ada yang membahasnya khususnya di Fakultas Syari'ah UIN RADEN INTAN LAMPUNG, selain itu juga sebagai syarat penulis dalam menyelesaikan strata satu dan sesuai dengan bidang keilmuan yang penulis tekuni sebagai mahasiswa fakultas syari'ah jurusan Siyash.

C. Latar Belakang

Eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia, tanpa hukum kehidupan manusia akan liar, siapa yang kuat dialah yang menang, tujuan hukum untuk melindungi kepentingan manusia dalam mempertahankan hak dan kewajiban.⁶

Negara Indonesia selaku Negara hukum mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi setiap individu sebagai warga Negara atas perlakuan

⁶ Mertokusumo Sudikno, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm.

yang sama dimata hukum, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal tersebut termasuk dalam salah satu hak konstitusional, dimana Undang-Undang mengatur mengenai hak atas seseorang, yakni hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hak konstitusional (*constitutional right*) adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD NRI 1945. Setelah amandemen UUD 1945 yang merupakan konstitusi negara Indonesia maka prinsip-prinsip HAM telah tercantum dalam konsitusi Indonesia sebagai ciri khas prinsip konstitusi modern. Oleh karena itu prinsip-prinsip HAM yang tercantum dalam UUD 1945 adalah merupakan Hak konstitusional Warga Negara Indonesia.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Persamaan dihadapan hukum pula dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.⁷ Perlakuan yang sama dihadapan hukum terutama tentang pemberian bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak atau kurang mampu sebagai perwujudan akan kebutuhan akses terhadap keadilan

⁷ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia hak untuk didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara* (Jakarta: PT Gramedia, 2010), hlm. 52

sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.⁸

Sering kali bantuan hukum diasosiasikan oleh masyarakat sebagai belas kasihan bagi fakir miskin. Seharusnya, bantuan hukum juga tidak hanya dilihat dalam arti yang sempit tetapi juga dalam arti yang luas. Selain membantu orang miskin bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia.⁹ Padahal, hak untuk dibela oleh advokat atau penasihat hukum (*access to legal counsel*) dan diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*) dalam rangka memperoleh keadilan (*justice*) adalah suatu hak asasi manusia bagi semua orang termasuk fakir miskin atau *justice for all*.¹⁰

Hak Asasi Manusia (HAM) sendiri menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pada hakikatnya HAM terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir HAM yang lainnya.¹¹

⁸ Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

⁹ Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Cendana Press, 1983), hlm. 141.

¹⁰ Frans Hendra Winarta, Op. Cit., hlm. 53.

¹¹ H. Baharuddin Lopa, *Alqur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 2.

Hak Asasi Manusia di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Dasar 1945, baik dalam pembukaan maupun dalam batang tubuhnya. Namun secara khusus, hak asasi manusia (HAM) diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk penghormatan terhadap hak-hak tersangka. Banyaknya insiden perlakuan tidak manusiawi, penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia, terutama orang miskin yang tidak mampu membayar jasa hukum dan pembelaan seorang advokat (penasihat hukum) profesional. Dalam keadaan seperti inilah bantuan hukum diperlakukan untuk membela fakir miskin agar tidak menjadi korban penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan tidak adil, serta merendahkan derajat manusia. Yang dilakukan oleh penegak hukum.

Bentuk bantuan hukum pada dasarnya sama, tetapi tentunya ada variasi di berbagai Negara dalam model pembelaan umum bagi orang miskin atau *pro bono public* yang relevan dengan prinsip persamaan dihadapan hukum. Sedangkan Indonesia mempunyai problem ketidakserasian distribusi sumber hukum antara yang kaya dan yang miskin.

Dalam Islam perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) telah lama dikenal. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia ini merupakan salah satu bentuk dari upaya penegakan keadilan. Konsep HAM dalam Islam didasarkan pada kesetaraan hak dan kewajiban antara sesama manusia. Konsep ini berpijak secara normatif pada prinsip persamaan (*Al-musawat*) dan kebebasan (*Al-hurriyat*) dalam norma-norma syari'ah bahwa asas paling fundamental tentang harkat dan martabat kemanusiaan lebih didasarkan pada

pemenuhan hak dan kewajiban yang melekat pada setiap manusia tanpa diskriminasi ras, suku, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, keyakinan dan agama, sikap politik, status sosial, dan lain-lain. Persamaan hak ini menjadi dasar bagi perumusan konsep bantuan hukum dalam Islam.¹² Karena bantuan hukum pula merupakan bagian dari hukum acara peradilan Islam.

Dalam Islam dasar dari hak asasi manusia adalah agama tauhid, agama yang mempunyai ajaran kemahaesaan Allah. Tauhid, yang dengan kuat dipegang oleh ajaran agama Islam, mengandung arti: hanya ada satu Pencipta bagi alam semesta.¹³ Ajaran dasar pertama dan utama dalam agama Islam adalah *la ilaha illallah* (tiada tuhan selain Allah), tiada pencipta selain Allah. Seluruh alam dan semua yang ada, baik diatas bumi, dipermukaan, maupun di dalam bumi adalah ciptaan Yang Maha Esa. Semuanya baik manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun benda tak bernyawa berasal dari Yang Maha Esa, yaitu Allah SWT.

Dalam agama tauhid yang demikian terkandung ide persamaan dan persaudaraan seluruh manusia. Bahkan bukan hanya itu saja, melainkan mencakup ide persamaan dan persatuan semua makhluk. Bila manusia saling bersaudara dan saling mencintai, maka tidak ada perbedaan kedudukan. Mereka mempunyai status dan kedudukan yang sama. Namun, bila memang ada perbedaan antara manusia yang berbeda bangsa, warna kulit, bahasa dan agama, satu-satunya perbedaan ialah ketakwaan dan perbuatan baiknya. Yang banyak perbuatan baiknya, itulah yang berkedudukan lebih tinggi, dan yang

¹² Didi kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), hlm. 38.

¹³ Harun Nasution, *Hak-Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hlm. 6.

sedikit perbuatan baiknya, itulah yang berkedudukan rendah. Akhir kata, perbedaan satu-satunya yang ada antara manusia yang bersaudara dan sama derajatnya dimaksud, hanyalah tinggi atau rendahnya moralnya.

Dari ajaran dasar persaudaraan, persamaan, dan kebebasan manusia yang diuraikan di atas, timbullah kebebasan-kebebasan manusia. Selain kebebasan dari perbudakan dan kebebasan beragama di atas, muncul pula kebebasan dari kekurangan, kebebasan dari rasa takut, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan bergerak, kebebasan dari penganiayaan, dan lain-lain. Di sinilah muncul hak asasi manusia, seperti hak hidup, hak memiliki pendapat, hak mengecap pendidikan, hak berbicara, hak berfikir, hak mendapat pekerjaan, hak memperoleh keadilan, hak persamaan, serta hak mendapat bantuan hukum. Dan lain-lain.

Selain itu perlu pula diungkapkan bahwa kebebasan manusia yang terdapat dalam ajaran agama Islam tidak bersifat absolut. Demikian pula hak-hak asasinya. Oleh karena itu, yang mempunyai keabsolutan dan ketidakterbatasan dalam ajaran agama Islam hanya Allah SWT, pencipta alam semesta dengan segala isinya. Yang lain hanya sebagai ciptaan Allah SWT yang mempunyai sifat keterbatasan. Namun, perlu juga diungkapkan bahwa selain manusia mempunyai sejumlah hak, manusia juga menyandang sejumlah kewajiban asasi yang mesti ditunaikannya, yaitu patuh kepada sejumlah perintah dan larangan Allah SWT. Bila manusia mempunyai sejumlah hak, maka hak-hak itu mempunyai batasan-batasan, yaitu dibatasi oleh hak Allah SWT sebagai pencipta dan hak-hak masyarakat manusia manusia lainnya.

Agama Islam sebagai agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia sangat berpengaruh dalam memberi perlakuan terhadap fakir miskin. orang yang lebih mampu dapat memberikan sedekah (*charity*) yang merupakan anjuran dan dapat pula berupa zakat (*obligator*) yang merupakan kewajiban bagi orang yang lebih mampu. Pasal 34 UUD 1945 mengatur tentang fakir miskin dan anak terlantar yang menjadi tanggung jawab Negara.¹⁴ sehingga boleh dikatakan bantuan terhadap fakir miskin, termasuk bantuan hukum, menjadi kewajiban Negara.

D. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Bagaimana Pola Hukum Positif mengenai pentingnya pemberian bantuan hukum dalam mewujudkan keadilan konstitusional bagi fakir miskin ?
2. Apakah pola yang digunakan hukum positif dalam mewujudkan keadilan konstitusional fakir miskin sesuai dengan hukum Islam ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pola hukum positif dalam mewujudkan hak konstitusional fakir miskin
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pentingnya pemberian bantuan hukum dalam mewujudkan hak konstitusional dalam perspektif Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

¹⁴ Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan secara teoritis yaitu sebagai berbagi ilmu pengetahuan kepada para pembaca untuk mengetahui peran dari bantuan hukum dalam mewujudkan hak konstitusional bagi fakir miskin
- b. Kegunaan praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah.

F. Metode Penelitian

Agar kegiatan praktis dalam penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini terlaksana dengan objektif, ilmiah, serta mencapai hasil yang optimal, maka penulis merumuskan beberapa macam langkah atau metode penelitian yang dipakai dalam karya ilmiah ini adalah metode deskriptif. Hal ini dimaksudkan agar penulisan karya ilmiah sesuai dengan syarat ilmiah yang sudah ditentukan. Adapun syarat-syarat tersebut terdapat didalam metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu suatu penelitian yang menekankan sumber informasi dari buku-buku hukum, jurnal, makalah, surat kabar, dan menelaah dari berbagai macam literatur-literatur dan pendapat

yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁵

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian hukum *yuridis normative*. Adapun bentuk penelitian *yuridis normatif* adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.¹⁶ Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif analitik* yaitu dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan.¹⁷

2. Sumber Data Penelitian

Guna memperoleh bahan hukum yang akurat untuk penulisan proposal ini, maka bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui dua cara yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan tentang sumber data tersebut, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber yang diperoleh dari data.¹⁸ bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya

¹⁵ Ranny Kautun, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Taruna Grafika, 2000), hlm. 38.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hlm. 15.

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 126.

¹⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Teknologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 28.

mempunyai otoritas. bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, Alquran serta hadist-hadist.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang diperoleh untuk memperkuat data diperoleh dari data primer.¹⁹ Yaitu buku-buku, makalah-makalah, majalah, artikel, internet dan sumber-sumber yang berkenaan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data bahan hukum, langkah pertama yang dikerjakan dalam penulisan penelitian ini adalah mencari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari membaca dan mempelajari literatur yang berupa buku dan karya ilmiah untuk mencari konsep maupun pendapat, baik pendapat para ahli hukum maupun pendapat para ulama yang berkaitan erat dengan permasalahan ini.²⁰ yang selanjutnya dibahas dan selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian.

b. Metode pengolahan data

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti

¹⁹ Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian*, (Bandar Lampung: LP2M IAIN RADEN INTAN), hlm. 75.

²⁰ *Ibid.* hlm. 84.

dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah. Adapun metode pengolahan data yakni sebagai berikut:

1) Editing

Sebelum data diolah, data tersebut perlu di edit dan diperiksa terlebih dahulu. Dengan kata lain data atau keterangan yang dikumpulkan dalam buku catatan yang perlu dibaca dan diperbaiki sekali lagi, jika disana sini masih terdapat hal-hal yang salah satunya masih meragukan.

2) Penyusunan Sistematis data

Penyusunan sistematis data yaitu menguraikan hasil penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

3) Analisis data

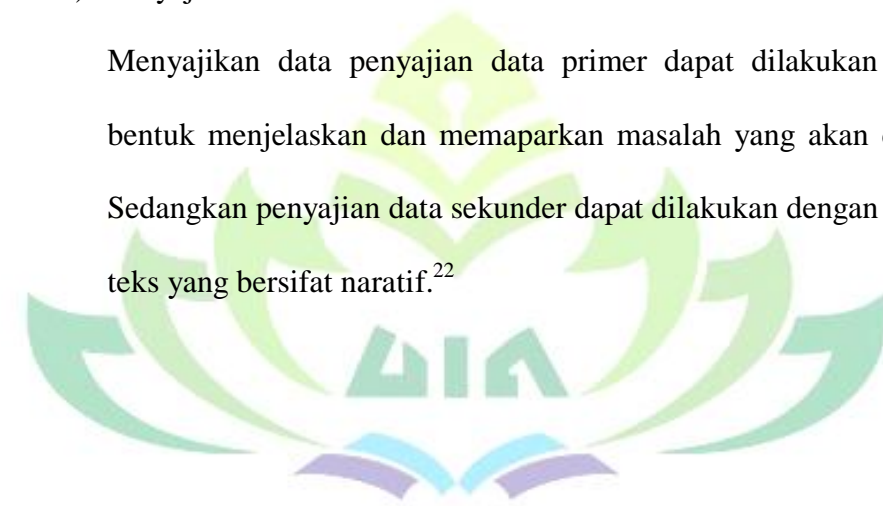
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik yaitu untuk memaparkan hasil dari penelitian ini, penelitian akan mendeskriptifkan secara luas data yang diperoleh kemudian difokuskan pada permasalahan yang diangkat. bahan-bahan yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis.²¹ Kemudian ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Dan kesimpulan yang diambil

²¹ Amirudin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 107.

dengan menggunakan cara berfikir deduktif yaitu dengan cara berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus analisis data kualitatif dilakukan dengan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

4) Penyajian data

Menyajikan data penyajian data primer dapat dilakukan dalam bentuk menjelaskan dan memaparkan masalah yang akan diteliti. Sedangkan penyajian data sekunder dapat dilakukan dengan bentuk teks yang bersifat naratif.²²



²² Sugiono, *Memaham Pengertian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2009), hlm. 92.

BAB II

BANTUAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DALAM ISLAM

A. Bantuan Hukum Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Bantuan Hukum dalam Islam

Bantuan hukum erat kaitannya dengan ketentuan hukum Islam yang mengajarkan setiap pemeluknya agar melindungi hak-hak setiap individu, bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*), dan adanya kewajiban dalam menegakkan hukum dan keadilan setiap individu. Ketentuan tersebut merupakan dasar yang paling fundamental bagi adanya bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam.¹

Prinsip-prinsip persamaan hak dan penegakan hukum dalam Islam bersumber pada Al-Qur'an, sunnah dan ijtihad. Diantaranya mewajibkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ayat Al-Qur'an mengenai tolong menolong tersebut menjadi dasar pula bagi adanya teori bantuan hukum dalam proses penegakan hukum dan keadilan dalam Islam.

Prinsip keadilan antarmanusia dalam Islam sendiri adalah bahwasanya semua rakyat mempunyai persamaan hak di depan Undang-

¹ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 28.

Undang Allah yang harus dilaksanakan oleh seluruh manusia tanpa kecuali.² Sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (*Q.S An-Nisaa: 58*).

Bantuan hukum dalam istilah literatur hukum Islam disebut dengan *al-muhamy* yang berarti membela, mempertahankan, melindungi.³ Hal tersebut dikarenakan istilah bantuan hukum yang terkait dengan profesi advokat. Maka *al-muhamy* dalam hukum Islam setara dengan pengacara (*lawyer*).⁴ Jika dilihat dari konteks sejarah hukum Islam, istilah *al-muhamy* juga dekat dengan peran kalangan penegak hukum pada zaman awal perkembangan hukum Islam, yaitu *hakam*, *mufti*, dan juru damai (*mushalaih alaiih*). Selain kata *al-muhamy*, bantuan hukum juga dikonotasikan dengan *wakalah*.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 124.

³ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 300.

⁴ Didi Kusnadi, *Op.Cit.*, hlm. 29-32.

Wakalah merupakan pemberian kuasa dari seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diperkenankan oleh syariat.⁵

Secara Istilah, *wakalah* bermakna mewakilkan suatu urusan kepada orang lain.⁶ Sifat *wakalah* yang mewakili urusan orang lain, identik dengan perwakilan seseorang untuk membantu menyelesaikan sengketa, terutama dalam proses peradilan. Pada kenyataannya, tidak semua orang memiliki kompetensi atau kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu yang berkaitan dengan kehidupannya. Manusia dalam menyelesaikan urusannya sendiri terkadang membutuhkan keterlibatan pihak lain dalam membantu menyelesaikannya.

Islam membolehkan *wakalah* karena manusia membutuhkannya. Sebab, manusia tidak mampu mengerjakan urusannya sendiri. Bantuan hukum meliputi 2 unsur, yaitu:

1) Pemberi Bantuan Hukum (*Wakil*)

Seseorang yang memberikan bantuan hukum merupakan seseorang yang diberi hak oleh penerima bantuan hukum untuk membantunya dalam menyelesaikan urusan/sengketanya.

2) Penerima Bantuan Hukum (*Muwakkil*)

Penerima bantuan hukum merupakan seseorang yang membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan sengketanya. *Fuqaha'* berpendapat

⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 3, penerjemah Imam Ghazali Said dan Achmad Zainudin, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), hlm. 269.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, Penerjemah Asep Sobari, dkk, (Jakarta : Al-I'tishom, 2008), hlm. 369.

bahwa orang-orang yang memiliki otoritas untuk mengatur dirinya sendiri diperbolehkan untuk memberi kuasa.⁷ Adapun syarat-syarat seorang pemberi kuasa (*Muwakkil*) diantaranya sebagai berikut:

- a) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
- b) Orang mukallaf atau anak *Mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakili untuk menerima hibah menerima sedekah dan lain sebagainya.

Maka tidak sah jika seperti orang gila dan anak kecil yang belum *Mumayyiz*, karena keduanya tidak memiliki *ahliyah* (kelayakan). Seorang anak kecil dapat meminta untuk *wakalah* hanya dalam urusan yang mendatangkan manfaat baginya, seperti menerima hadiah, sedekah dan wasiat.⁸

Bantuan hukum dalam hukum Islam berasal dari teori persamaan hak hukum manusia yang didasarkan pada teori kehormatan manusia (*al-fitrah*). Secara alami dan hakiki (*fitrah*) setiap orang memiliki hak untuk bebas dalam harkat dan matabat. Teori tersebut dikemukakan oleh al-Maududi dalam *human righ in Islam* bahwa secara fitrah setiap orang terlahir dalam keadaan bebas dan sama dalam harkat dan martabat. (*all human beings are born free and equal in diqnity and right*).⁹ Bantuan hukum dalam hukum Islam tidak sesederhana seperti dipahami dalam konteks Barat, yaitu jasa hukum cuma-cuma (*prodeo*), melainkan

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3, *Op.Cit.*, hlm 260.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, *Op.Cit.*, hlm 399.

⁹ Didi Kusnadi, *Op.Cit.*, hlm. 36.

seseorang yang bertugas menegakan hukum dan keadilan. Secara etimologis, pengertian bantuan hukum dan pengacara/advokat dalam sejarah Islam dapat dilihat pada dua aspek, yakni:

- 1) Bantuan hukum merupakan suatu jasa hukum atau profesi hukum yang ditujukan untuk menegakan hukum dan/atau membantu klien mendapatkan keadilan di depan hukum.
- 2) Istilah *muhamy*, *hakam*, *mufti*, dan *mushalaih 'alaih* hamper setara makna dan kedudukannya dengan profesi advokat dan pengacara dalam member jasa konsultasi hukum atau penasehat hukum yang berperan sebagai pemberi jasa hukum. Jasa hukum yang diberikan dapat berupa konsultasi hukum, menjalankah kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain bagi klien untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan sengketa atau memberikan nasehat atau *advice* kepada para pihak agar masing-masing melaksanakan kewajiban dan mengembalikan haknya kepada pihak lain secara sah dan sukarela.¹⁰

Jadi, bantuan hukum dalam Islam dapat disebut sebagai jasa hukum yang diberikan untuk menegakan hukum dan keadilan oleh seorang ahli hukum (pengacara) dalam menyelesaikan perkara klien, baik diluar maupun di pengadilan.

2. Sejarah Bantuan Hukum dalam Islam

¹⁰ *Ibid.*, hlm 53.

Pada kalangan masyarakat badui dan masyarakat yang telah menetap (masa pra-Islam), hukum status pribadi dan keluarga, waris dan hukum pidana didominasi sistem kesukuan Arab kuno. Institusi hukum di jazirah Arab pada masa Nabi Muhammad sama sekali masih bersifat elementer. *Pertama*, terdapat hukum adat mayoritas suku badui arab yang meskipun memiliki karakter primordial namun sama sekali tidak sederhana dalam aturan dan aplikasinya. Prosedur pelaksanaan hukum pada masa Pra-islam khususnya yang dilaksanakan oleh masyarakat arab badui didominasi oleh prosedur sakral, seperti sumpah dan serapah, hukum positif orang arab kuno diputuskan secara profan, bersifat sehari-hari dan informal. Bahkan hukum pidananya direduksi kedalam persoalan ganti rugi dan pembayaran, pelaksanaan hukum masa pra-islam tidak mengenal bantuan hukum dalam artian melindungi hak-hak masyarakat diluar dari kesukuan mayoritas yang ada di arab pada masa itu. Keadaan ini bisa kita lihat dari perilaku masyarakat arab pada masa itu adalah *jahiliyah*¹¹.

masyarakat arab pada masa itu masih tidak mengenal bantuan hukum sebagai sebuah hak yang melekat pada masyarakat. Karena masyarakat arab pra-islam meletakkan posisi masyarakat berdasarkan mayoritas kesukuan dan strata sosial di masyarakat sehingga bantuan hukum yang ditujukan bagi masyarakat lemah, cacat hukum dan tidak cakap hukum sulit untuk mendapatkan bantuan hukum manakala

¹¹ Indra Maley "Sejarah Sosial Bantuan Hukum dalam Islam", (On-line), tersedia di: <https://indramaley.wordpress.com/2016/01/01/sejarah-sosial-bantuan-hukum-dalam-islam/>.

mempunyai masalah dengan hukum. Kondisi masyarakat arab pra-islam yang menunjukkan ketiadaan sebuah sistem pengadilan yang tertata.

Secara singkat dapat digambarkan tataran hidup masyarakat Arab tersebut sebagai berikut:

- 1) Menganut sistem kesukuan (*qabilah*)
- 2) Memiliki tata sosial politik yang tertutup dengan partisipasi warga yang terbatas. Faktor keturunan lebih penting dibanding faktor kemampuan
- 3) Hierarki sosial yang kuat
- 4) Kedudukan perempuan yang cenderung direndahkan.¹²

Praktik bantuan hukum dalam sejarah hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari prosedur penyelenggaraan pemerintahan Islam. Periode sasi pembangunan hukum Islam pada masa awal Islam, Rasulullah memegang peran sentral sebagai pemimpin agama, pemimpin politik, dan pemegang otoritas hukum tertinggi. Akan tetapi, dalam perkembangannya, ketika memasuki fase kekhalifahan Islam, terjadi pemisahan kekuasaan antara kekuasaan legislatif (*Majlis Syura'*), kekuasaan eksekutif (*Khalifah*), dan kekuasaan yudikatif (*Mahkamah al-qadaiyah*). Atas dasar hal tersebut, bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam pada masa Rasulullah dan kekhalifahan Islam tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan kehakiman dalam praktik hukum ketatanegaraan Islam.¹³

¹² Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hlm. 26.

¹³ Didi Kusnadi, *Op.Cit.*, hlm. 50.

Perkembangan bantuan hukum pada masa sahabat lebih berkembang pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yang mulai melimpahkan peradilan pada pihak lain yang memiliki otoritas untuk itu. Lebih dari itu Umar bin Khattab mulai membenahi lembaga peradilan untuk memulihkan kepercayaan umat terhadap lembaga peradilan. Selain adanya lembaga arbitrase dengan sebaik-baiknya agar mampu menjadi lembaga alternatif tempat penyelesaian sengketa bagi umat. Bahkan Umar berhasil menyusun pokok-pokok pedoman beracara di pengadilan (*risalah al-qada*) yang ditujukan kepada seorang *qadi*, Abu Musa Al-Asy'ari.

Berikut sebagian contoh keadilan mutlak yang dicatat oleh sejarah Islam:

1. Amirul mukminin Ali bin Abi Thalib mendapatkan baju besinya di tangan seorang nasrani, maka beliau mengajukan perkara kepada Qadhi Syuraih, beliau berkata: itu adalah baju besiku, aku tidak menjualnya dan tidak menghibahkannya. Lalu Qadhi Syuraih bertanya kepada orang nasrani: apa komentarmu atas apa yang dikatakan amirul mukminin? Orang nasrani berkata: baju besi ini milikku dan menurutku amirul mukminin bukanlah seorang pendusta.

Lalu Syuraih menoleh kepada Ali bertanya kepada beliau: wahai amirul mukminin, apakah anda mempunyai bukti? Ali berkata: aku tidak mempunyai bukti. Maka Qadhi Syuraih memenangkan perkara bagi orang nasrani, maka ia mengambil baju besi itu dan kemudian pergi, akan tetapi setelah berjalan beberapa langkah ia

kembali dan berkata: aku bersaksi bahwa ini adalah putusan para nabi, amirul mukminin mengadukan aku kepada hakimnya, dan hakim itu memenangkan aku, aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Baju besi ini milikmu wahai Amirul Mukminin, aku berjalan di belakang pasukan ketika engkau pergi meninggalkan shiffin, dan baju besi itu keluar dari untamu yang coklat. Maka Ali berkata: karena engkau telah masuk Islam maka baju besi itu menjadi milikmu, dan beliau menaikkannya di atas kuda.

Penduduk Samarkand menyampaikan pengaduan kepada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz atas panglima pasukan Qutaibah, karena pasukan Islam masuk negara mereka dan memerangnya tanpa peringatan sebelumnya sebagaimana diwajibkan oleh syari'at Al-Qur'an, maka Amirul Mukminin mengalihkan pengaduan mereka kepada Qadhi, lalu penduduk Samarkand memenangkan perkara, karena Qadhi membuat putusan agar umat Islam keluar dari Samarkand.

Setelah penduduk Samarkand melihat punya keadilan itu, mereka mengumumkan keIslaman mereka, dan memuji pengadilan Islam dan pasukan penaklukan, dan menyampaikan penerimaan mereka pada hukum Negara Islam.¹⁴

¹⁴ Muhammad Ali Al-Hasyimi, *Keadilan dan Persamaan dalam Masyarakat Muslim*, tersedia di: https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_articles/chain/Masyarakat_Muslim/id_07_masyarakat_muslim.pdf, 26 Oktober 2017

3. Landasan Hukum Bantuan Hukum dalam Islam

Pada konsep hukum Islam, manusia berkedudukan sama dihadapan hukum. Pemenuhan hak dan kewajiban merupakan tujuan dari keadilan hukum itu sendiri. Otoritas pembuat hukum mutlak berada di tangan Allah sedangkan penguasa dan rakyat hanya diberi amanat untuk menyelesaikan urusan-urusan publik bersumber pada wahyu dan selebihnya ditentukan oleh manusia melalui ijtihad berdasarkan prinsip musyawarah.¹⁵ Karena ulama syariat dan pakar Undang-Undang konstitusional meletakkan musyawarah sebagai kewajiban keIslaman dan prinsip konstitusional yang pokok di atas prinsip-prinsip umum dan dasar-dasar baku yang telah ditetapkan oleh nash Al-Quran dan hadis.¹⁶ Adapun dasar hukum di antaranya,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

Artinya:

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S.al-Ma'idah: 2)

Dalam hadist juga disebutkan bahwa: “Dari Abu Hurairah r.a. daripada Nabi SAW, Baginda telah bersabda: “Barangsiapa yang melepaskan seorang mukmin daripada satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskannya daripada

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 29.

¹⁶ Farid Adul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 35.

satu kesusahan daripada kesusahan kesusahan Qiamat. Barang siapa yang mempermudah bagi orang susah, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat.....” (Hadist diriwayatkan oleh al-Imam Muslim)¹⁷.

Jumhur ulama membolehkan berwakil dalam segala hal, termasuk kuasa hukum dalam berperkara. Dalam berperkara, manusia sangat membutuhkan bantuan atau kuasa hukum sebab pada saat-saat tertentu seseorang lemah dalam menegakan hak atau kemaslahatan untuk dirinya. Umpamanya karena sakit, tidak mengetahui hukum acara, atau sibuk sehingga tidak mungkin menghadapi sepenuhnya sidang perkara.

Perintah Allah terhadap memperbanyak usaha kebajikan yang bermanfaat bagi umat baik di dunia maupun di akhirat. Tolong-menolong yang merupakan dasar dari bantuan hukum, memiliki kaitan yang erat dengan keadilan. Tujuan dari bantuan hukum adalah menyamakan kesenjangan dari berbagai segi, termasuk dalam aspek ekonomi, sosial, dan lain sebagainya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ۖ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.

¹⁷ www.suduthukum.com/2017/01/bantuan-hukum-menurut-islam.html. diakses pada 28/07/2017 jam 18.48.

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Maidah: 8)

Keadilan merupakan kata yang merujuk pada substansi ajaran Islam. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya.¹⁸ Keadilan berasal dari kata *adala* yang berarti sama. Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat immaterial. Persamaan merupakan makna asal dari kata adil yang menjadikan pelakunya tidak berpihak, karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Persamaan tersebutlah yang menjadikan seseorang yang adil berpihak kepada salah seorang yang berselisih.¹⁹

Keadilan mencakup dalam segala hal, karena bersikap adil merupakan perhatian pada setiap individu dan masyarakat. Pemenuhan keadilan dalam bidang hukum salah satunya ialah dengan menyamakan kesenjangan. Bagi masyarakat miskin dan tidak mengerti hukum, dapat tetap memenuhi haknya dengan adanya bantuan hukum. Manusia dituntut untuk menegakkan keadilan walaupun kepada dirinya, keluarga, bahkan terhadap musuhnya sekalipun.

4. Tujuan Bantuan Hukum dalam Islam

Wakalah adalah seseorang yang menyerahkan suatu urusan kepada orang lain yang diperbolehkan oleh syara', supaya yang diwakilkan dapat

50. ¹⁸ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, volume 3, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm.

¹⁹ M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Miza, 2013), hlm. 148

mengerjakan apa yang harus dilakukan.²⁰ *wakalah* merupakan salah satu akad yang dapat diaplikasikan ke berbagai bidang, termasuk bidang hukum. Bantuan hukum (*wakalah*) pada dasarnya ialah untuk membantu seseorang dalam menyelesaikan perkara yang sedang dihadapi. Baik untuk membantu perbuatan tertentu atau masalah hukum yang dihadapi. Perwakilan dalam bidang hukum dalam arti sempit bertujuan memberikan kuasa pada orang lain untuk menyelesaikan urusan-urusan hukum.

Orang yang berurusan dengan hukum namun tidak memahami hukum akan sangat kesulitan sehingga adanya bantuan hukum akan dapat memenuhi kebutuhannya. *Kemaslahatan* bagi manusia yang dipenuhi oleh tujuan dari bantuan hukum tersebut meliputi kebutuhan *daruriyyat* dan kebutuhan *hajiyyat*. Organisasi bantuan hukum merupakan kebutuhan *hajiyyat* ketika tidak terjadi masalah hukum. Namun, kebutuhan akan bantuan hukum merupakan kebutuhan *daruriyyat*, terutama ketika terjadi masalah hukum. Berdasarkan tujuan dari bantuan hukum tersebut, maka dapat disimpulkan meliputi,

- 1) Mewujudkan kebutuhan *daruriyyat* manusia
- 2) Mengaplikasikan prinsip tolong-menolong secara universal
- 3) Membantu seseorang dalam menyelesaikan perkara yang sedang dihadapi
- 4) Membantu orang yang didzalimi dan mencegah orang yang bertindak zalim.

²⁰ <https://al-badar.net/pengertian-hukum-rukun-dan-syarat-wakalah/> diakses pada 13/08/2017 pukul 16:40.

B. Teori Keadilan dalam Islam

Ajaran Islam mengatur bentuk hubungan Tuhan dengan Makhluq-Nya, hubungan antara sesama mahluk, dengan alam semesta dan kehidupan, hubungan manusia dengan dirinya, antara individu dengan masyarakat, antara individu dengan negara, antara seluruh umat manusia, antara generasi yang satu dengan generasi yang lain, semuanya dikembalikan kepada konsep menyeluruh yang terpadu, dan inilah yang disebut sebagai filsafat Islam.

Syari'at Islam yang diturunkan dari Allah SWT telah menanamkan dasar keadilan dalam masyarakat muslim yang tidak ada duanya, Islam memerintahkan umatnya untuk berbuat adil pada semua orang. Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil dan menegakan keadilan pada setiap tindakan perbuatan yang dilakukan. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an.

Al-Qur'an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkutan paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata '*adl*' dan '*qisth*' sama artinya.²¹ hukum dan sebagainya digunakan oleh Al-Qur'an dalam pengertian keadilan.

Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu

²¹ Farid Abdul Khalid, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta, Amzah, 2005), hlm. 200.

menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.²²

Kalau dikategorikan, ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam al-Qur'an dari akar kata 'adl itu, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang dalam mengambil keputusan "hendaknya kalian menghukumi atau mengambil keputusan atas dasar keadilan". Secara keseluruhan, pengertian-pengertian terkait langsung dengan sisi keadilan, yaitu sebagai penjabaran bentuk-bentuk keadilan dalam kehidupan. Dari terkaitnya beberapa pengertian kata 'adl dengan wawasan atau sisi keadilan secara langsung itu saja, sudah tampak dengan jelas beberapa porsi "warna keadilan" mendapat tempat dalam Al-Qur'an.

Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan untuk berlaku adil, diantaranya yakni Al-Qur'an memerintahkan berkata adil, meskipun memberi resiko terhadap keluarga kita sendiri, dan harus berlaku adil terhadap siapapun.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (Q.S An-Nisa: 58)

²² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 25

Dalam Islam hidup berdampingan dengan damai baru terlaksana apabila didasarkan kepada keadilan, baik di antara manusia maupun di antara berbagai Negara, bahkan perang pun terjadi karena salah satu pihak merasa diperlakukan dengan tidak adil. Oleh karena itu, ajaran Islam mewajibkan penegakan keadilan baik terhadap diri sendiri, keluarga, tetangga, bahkan terhadap musuh sekalipun kita wajib bertindak adil. Dalam Al-Qur'an pun dijelaskan secara tegas mengenai keadilan, banyak ayat-ayat yang berbicara tentang keadilan, antara lain:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ اَلَّا تَعْدِلُوْا ۚ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ



“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” Q.S Al-Maidah: 8

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اُوْلٰىۤىٰۤىٔ هِمًّا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوْا الْهَوٰىۙ اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلَوْا اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا



“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan

(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”²³ Q.S An-Nisa’: 135

Hal ini mengisyaratkan agar kebencian dan kecintaan yang berlebih tidak menyebabkan keadilan.

Menurut hukum Islam, keadilan yang harus dicapai mesti mengacu pada pedoman pokok agama Islam, yaitu Al-Qur’an dan Hadis. Artinya tujuan keadilan melalui jalur hukum harus berawal dari dua segi karena pedoman Islam berupa Al-Qur’an dan Hadis di satu segi harus mampu menyatu dengan pedoman prinsi keadilan secara umum menurut pandangan manusia di lain segi.

Banyak ayat-ayat Al-Qur’an maupun Hadis yang menerangkan tentang keadilan, salah satunya dalam hadis:

“Dari Abdullah Ibn ‘Amr Ibn al-‘Ash ra. Berkata: Rasulullah SAW, bersabda: Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil kelak di sisi Allah akan menempati beberapa mimbar dari cahaya. Mereka itu ialah orang-orang yang adil dalam menerapkan hukum, juga terhadap keluarga dan perihwal apapun yang mereka diberi kekuasaan untuk mengaturnya”. (HR. Muslim)²⁴

Keadilan dalam Islam merupakan perpaduan harmonis antara hukum dengan moralitas, Islam tidak bertujuan untuk menghancurkan kebebasan individu, tetapi mengontrol kebebasan itu demi keselarasan dan harmonisasi masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri. Hukum Islam memiliki peran dalam mendamaikan pribadi dengan kepentingan kolektif, bukan sebaliknya.

Dalam Islam perintah berlaku adil ditunjukkan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku

²³ *Ibid.*, hlm. 100.

²⁴ Hadis Sahih, diriwayatkan oleh Muslim, Hadis No. 3406; al-Nasa’I, Hadis No. 5284; Ahmad, Hadis No. 6197, 6204 dan 6603.

adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, kesempatan yang sama.²⁵ Senada dengan itu bahwa Islam tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan.

Islam juga mengajarkan manusia agar memenuhi janji, tugas dan amanat yang dipikulnya, melindungi yang menderita, lemah dan kekurangan, merasakan solidaritas secara konkrit dengan sesama warga masyarakat, jujur dalam bersikap, dan seterusnya. Hal-hal yang ditentukan sebagai capaian yang harus diraih kaum muslim itu menunjukkan orientasi yang sangat kuat akar keadilan. Demikian pula, wawasan keadilan itu tidak hanya dibatasi hanya pada lingkungan mikro dari kehidupan warga masyarakat secara perorangan, melainkan juga lingkup makro kehidupan masyarakat itu sendiri. Sikap adil tidak hanya dituntut bagi kaum Muslim saja tetapi juga mereka yang beragama lain. Itupun tidak hanya dibatasi sikap adil dalam urusan-urusan mereka belaka, melainkan juga dalam kebebasan mereka untuk mempertahankan keyakinan dan melaksanakan ajaran agama masing-masing.

Setiap anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis

²⁵ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995), hlm. 73

orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk diberikan kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya.²⁶

Fase terpenting dari wawasan keadilan yang dibawa Islam adalah sifatnya sebagai perintah agama, bukan sekedar sebagai acuan etis atau dorongan moral belaka. Pelaksanaannya merupakan pemenuhan kewajiban agama, dan dengan demikian akan diperhitungkan dalam amal perbuatan seorang Muslim dihari perhitungan kelak. Dengan demikian, wawasan keadilan dalam Islam dapat diterima sebagai sesuatu yang ideologis, sudah tentu dengan segenap bahaya-bahaya yang ditimbulkannya, karena ternyata dalam sejarah, keadilan ideologis cenderung membuahkan tirani yang meningkari keadilan itu.

Penegakan keadilan menjadi tugas hukum atau merupakan kegunaan hukum. Keadilan yang menjadi tugas hukum merupakan hasil penyerasian atau keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum. Secara ideal kepastian hukum merupakan pencerminan azas tidak merugikan orang lain, sedangkan kesebandingan hukum merupakan pencerminan azas bertindak sebanding. Oleh karena keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum merupakan inti penegakan hukum, maka penegakan hukum sesungguhnya dipengaruhi oleh struktur dan individu-individunya.

Keadilan hukum dalam Islam bersumber dari Tuhan yang Maha Adil, karena pada hakikatnya Allah-lah yang menegakan keadilan (*qaiman bil qisht*), maka harus diyakini bahwa Allah tidak berlaku aniaya (zalim) kepada

²⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 74

hamba-hamba-Nya. Oleh karena itu setiap perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan kepada-Nya pada hari keadilan (Q.S An-Nisaa' : 110).

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا

رَحِيمًا

“Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S An-Nisaa': 110).²⁷

Adil dalam pengertian persamaan yaitu persamaan dalam hak, tanpa membedakan siapa, dari mana orang yang akan diberikan sesuatu keputusan oleh orang yang diserahkan menegakan keadilan.

Dalam prinsip keadilan hukum ini Nabi SAW menegaskan adanya persamaan mutlak dihadapan hukum-hukum syariat. Keadilan dalam hal ini tidak membedakan status sosial seseorang, apakah ia kaya atau miskin, pejabat atau rakyat jelata, dan tidak pula karena perbedaan warna kulit serta perbedaan bangsa dan agama, karena di hadapan hukum semuanya sama.

Konsep persamaan yang terkandung dalam keadilan tidak pula menutup kemungkinan adanya pengakuan tentang kelebihan dalam beberapa aspek, yang dapat melebihkan seseorang karena prestasi yang dimilikinya. Akan tetapi kelebihan tersebut tidaklah akan membawa perbedaan perlakuan hukum atas dirinya. Pengakuan adanya persamaan, bahkan dalam al-Qur'an

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994), hlm. 140

dinyatakan sebagai pemberian Allah yang mempunyai implikasi terhadap tingkah laku manusia, adalah bagian dari sifat kemuliaan manusia (*al-karamah al-insaniah*), yang juga bagian dari ketetapan Tuhan.

Prinsip persamaan dalam Islam dapat dipahami antara lain dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
١٠

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”

Prinsip persamaan telah ditegaskan pula dalam Sunnah Rasul. Ada dua hadits beliau yang perlu diperhatikan dalam konteks ini.

“sesungguhnya leluhurmu adalah satu yaitu Adam. Karena itu tidak ada perbedaan antara orang Arab dan bukan Arab, antara orang yang berkulit merah atau yang berkulit hitam, kecuali karena takanya kepada Allah”

Hadits yang kedua berbunyi:

“sesungguhnya manusia itu sama rata seperti gerigi sisir”

Dua hadits tersebut menggambarkan bahwa dalam Islam semua manusia adalah sama dan tidak ada perbedaan atau diskriminasi atas dasar apa pun, kecuali takwanya kepada Allah.²⁸ Prinsip persamaan dalam demokrasi Islam mengandung aspek yang luas, ia mencakup persamaan dalam segala bidang kehidupan, persamaan itu meliputi bidang hukum, politik, ekonomi,

²⁸ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Penada Media, 2004), hlm. 126.

sosial dan lainnya. Persamaan dalam bidang hukum memberikan jaminan akan perlakuan dan perlindungan hukum yang sama terhadap semua orang tanpa memandang kedudukannya apakah ia termasuk dari kalangan orang kaya atau kelompok rakyat biasa.²⁹

Konstruksi nalar Islam tentang hukum dan keadilan mempresentasikan pandangan yang mengaitkan keadilan dengan kebenaran. Mencari keadilan sama dengan mencari kebenaran. Sedangkan kebenaran adalah representasi dari kehendak Tuhan kepada manusia yang dijabarkan melalui *al-ahkam al-khamsah*, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Pada akhirnya, keadilan mengacu pada upaya penegak hukum dalam menemukan dan memberikan hukum itu sendiri.

²⁹ *Ibid.* hlm. 126.

BAB III

BANTUAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DALAM HUKUM POSITIF

A. Keadilan dalam UUD 1945

Kata keadilan digunakan berulang-ulang dalam konteks dan makna yang berbeda-beda dalam UUD 1945. Keadilan dirumuskan sebagai sila kelima dalam pancasila. Tetapi kandungan dan maknanya menjadi lebih terasa apabila langsung membacanya dari rumusan Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 itu, sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat dirumuskan secara statis sebagai objek dasar negara. Tetapi keadilan sosial dirumuskan dengan kalimat aktif.

Pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 itu tertulis, “.... susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dari rumusan ini kita dapat mengetahui bahwa keadilan merupakan sesuatu yang harus diwujudkan secara dinamis dalam suatu bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pembukaan UUD 1945, pesan keadilan ini jelas tergambar pula dalam banyak rumusan lain. Dalam Alinea I dinyatakan adanya prinsip “prikemanusiaan dan prikeadilan” yang dijadikan alasan mengapa

penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Pada Alinea II digambarkan bahwa bangsa kita telah berhasil mencapai pintu gerbang “Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”. Pada Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Diatur pula bahwa “setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.¹

Sementara itu, dalam bab IX tentang kekuasaan kehakiman, istilah adil dan keadilan juga berkali-kali disebut, yang tentu saja, dalam makna keadilan hukum. Misalnya dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”. Di samping digunakan juga istilah peradilan dan pengadilan, pada pasal 24A ayat (2) dan pasal 24C ayat (5) dinyatakan bahwa untuk menjadi hakim agung dan hakim konstitusi haruslah dipenuhi syarat kemampuan bersikap sebagai hakim agung dan hakim konstitusi yang adil.

Dalam konsep keadilan, banyak istilah yang digunakan untuk menerangkan berbagai konteks pengertian yang dikandungnya. Dalam bidang hukum, kita biasa menggunakan istilah-istilah keadaan substansif versus keadilan prosedural untuk menggambarkan dalam keadilan itu ada masalah isi atau esensi dan ada pula masalah prosesnya atau prosedur

¹<https://www.google.co.id/search?dcr=0&source=hp&q=pesan+keadilan+sosial&oq=pesan+keadilan+sosial> diakses pada 8/9/2017 jam 21:48

untuk mewujudkannya. Keduanya sama-sama penting untuk terwujudnya kedilan dalam kenyataan.

B. Bantuan Hukum Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Bantuan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan

Bantuan hukum dalam bahasa asing memiliki banyak sebutan, seperti *rechtsdhulp*, *reschtbijstand*, *legal aid*, *legal assistance*, *rechtspeistaind*, dan sebagainya.² Bantuan hukum secara luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Upaya tersebut mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan tersebut ditaati, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan tersebut dihayati. Istilah bantuan hukum sendiri mengandung beberapa pengertian yakni:

- a) *Legal aid* digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu (secara finansial).
- b) *Legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada yang tidak mampu, ataupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat dan/atau pengacara yang mepergunakan honorarium.

² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 67.

c) *Legal services* yang secara tepat diartikan dengan pelayanan hukum.³

Legal Services merupakan pemberian bantuan hukum kepada seluruh anggota masyarakat yang dalam operasionalnya untuk bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan hukum serta pemberian jasa antara masyarakat miskin dengan masyarakat kaya, agar tercapainya untuk mewujudkan kebenaran dalam hukum itu sendiri oleh aparat-aparat penegak hukum dengan cara jalan menghormati, setiap hak-haknya yang dibenarkan oleh hukum itu bagi setiap anggota masyarakat tanpa membeda-bedakan yang kaya dengan yang miskin. Akan tetapi, hal ini lebih cenderung kepada untuk menyelesaikan adanya setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.

Menciptakan perlindungan hak individu dalam proses penegakan hukum dapat dilakukan antara lain melalui pemberian bantuan hukum bagi kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban tindakan sewenang-wenang dalam proses penegakan hukum. Upaya tersebut menuntut agar sistem bantuan hukum yang berlaku dapat mendorong terciptanya perlindungan hak individu dalam penegakan hukum. Sejalan dengan peningkatan kualitas bantuan hukum, diharapkan proses hukum dapat memuaskan dan melayani masyarakat dengan baik, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Bantuan hukum selain memberi layanan hukum juga berperan untuk

³ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), hlm. 9.

mendorong atau bahkan memaksa aparat penegak hukum untuk tidak berbuat sewenang-wenang dalam melaksanakan proses hukum. Frans Hendra Winarta menyimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata, dan tata usaha Negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dalam kaidah hukum, serta hak asasi manusia.

Melalui istilah bantuan hukum secara umum dan pengertiannya, maka dapat diartikan bahwa bantuan hukum atau *Legal Aid* merupakan jasa yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara finansial dengan cuma-cuma dalam rangka menjamin hak konstitusional bagi setiap warga Negara yang mencakup perlindungan hukum, kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan sebagainya. Adapun pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum diartikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.⁴

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- 1) Keadilan;
- 2) Persamaan kedudukan di dalam hukum;

⁴ Undang-Undang No. 16 Tahun 2011, Pasal 1 ayat (1).

- 3) Keterbukaan;
- 4) Efisiensi;
- 5) Efektivitas; dan
- 6) Akuntabilitas.⁵

Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh penerima bantuan hukum. Sedangkan pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang bantuan hukum.

2. Sejarah Bantuan Hukum

Bantuan hukum telah dilaksanakan pada masyarakat Barat sejak zaman Romawi. Bantuan hukum pada masa tersebut berada dalam bidang moral dan dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia khususnya untuk menolong orang lain tanpa mengharapkan dan/atau menerima imbalan atau honorarium.⁶

Bantuan hukum yang dilakukan identik dengan profesi advokat. Pekerjaan advokat, telah dikenal sejak zaman Romawi yang profesinya disebut dengan *officium nobelium*, sedang orang yang mengerjakannya disebut sebagai *operae liberalis* yang sekarang disebut dengan advokat.⁷

Selain menyebutkan bahwa bantuan hukum lahir ketika para filsuf Yunani mendiskusikan beberapa aspek yang berkaitan dengan Tuhan,

⁵ Undang-Undang No. 16 Tahun 2011, Pasal 2.

⁶ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 11.

⁷ Roupam Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, (Jakarta: PT Grasindo, 2003), hlm. 6.

alam, dan manusia. Pada abad ke-15, Thomas Hobbes yang merupakan pemikir Barat yang banyak menjelaskan tentang konsep hak alami (*natural Rights*) dalam ajaran filsafat moral dan politik. Hak alami ialah sesuatu yang sangat universal dan inheren dengan etika dan tidak terbatas pada tindakan dan keyakinan manusia. Paham tersebut dipengaruhi oleh teori hukum alam yang berkembang di Barat pada abad pencerahan. Hobbes menekankan bahwa hak asasi (*the rights*) sangat dibatasi oleh ukuran dan standar keuniversalitasnya, sedangkan hak alami dibatasi institusi-institusi sosial. Penentuan suatu ukuran keadilan di depan hukum dengan demikian tidak hanya dilakukan sebuah kesepakatan kolektif (*social contract*), tetapi juga diatur melalui sistem kekuasaan politik (*political authority*). Pada perkembangannya, di dunia Barat dikenal pula filsafat hukum alam (*lex naturalis/natural law/natural rights*), terutama saat memasuki abad 19 dan 20, muncul gerakan hak asasi manusia yang meyakini bahwa setiap orang memiliki persamaan hak dan kebebasan. Atas dasar hal tersebut pula, lahir prinsip persamaan hak hukum dan persamaan hak mendapat keadilan.⁸

Bantuan hukum harus responsif terhadap tuntutan keadilan bagi setiap warga Negara. Bantuan hukum dalam sejarah Indonesia mulai ada sejak tahun 1500 M, bersamaan dengan datangnya bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda.⁹ Bantuan hukum hingga sekarang telah mengalami banyak kemajuan.

⁸ Didi Kurnadi, *Op.Cit.*, hlm. 21

⁹ Abdul Manan, *Loc.Cit.*, hlm. 67

Bantuan hukum khususnya bagi masyarakat kecil yang tidak mampu dan buta hukum, merupakan relatif baru pada negara-negara berkembang, demikian juga di Indonesia. Bantuan hukum sebagai suatu *legal institution* semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. Bantuan hukum baru dikenal oleh Indonesia sejak masuk dan diberlakukannya sistem Barat di Indonesia. Pada dekade terakhir, bantuan hukum berkembang pesat di Indonesia, terlebih sejak pelita (Pembangunan Lima Tahun) ke III pemerintah mencanangkan program bantuan hukum sebagai jalur untuk meratakan jalan menuju pemerataan keadilan dibidang hukum.¹⁰

1) Masa Penjajahan Belanda

Bantuan hukum secara formal di Indonesia telah ada sejak masa penjajahan Belanda. Bermula pada tahun 1848, ketika di Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, maka titah raja tanggal 16 Mei 1848 Nomor 1, perundang-undangan baru di Negara Belanda tersebut juga diberlakukan untuk Indonesia.¹¹ antara lain sebagai berikut:

- a) Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Pengadilan (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der Justitie/ RO*). Peraturan tersebut merupakan pertama kalinya mengatur tentang Imbaga advokat, maka dapat dipastikan bantuan hukum dalam arti formal baru mulai di Indonesia pada tahun-tahun tersebut dan

¹⁰ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op.Cit.*, hlm. 11.

¹¹ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op.Cit.*, hlm. 12

masih terbatas bagi orang-orang Eropa dalam peradilan *Raad an Justitie* (Pengadilan Negeri). Sementara itu, advokat pertama Indonesia ialah Mertojoesoemo yang baru membuka kantornya di Tegal dan Semarang sekitar tahun 1923.

- b) Pada hukum positif Indonesia masalah bantuan hukum diatur dalam Pasal 250 ayat (5) dan (6) *Het Herziene Indonesische Reglemen* (HIR/ Hukum Acara Pidana Lama) dengan cakupan yang terbatas. Pasal tersebut dalam prakteknya hanya mengutamakan bangsa Belanda daripada bangsa Indonesia. Daya laku Pasal tersebut hanya terbatas apabila advokat tersedia dan bersedia membela mereka yang dituduh dan diancam hukuman mati atau hukuman seumur hidup.

Pada masa penjajahan Belanda, sistem peradilan terpisah dalam tiga golongan, yakni golongan Eropa, Asia Timur, dan Pribumi. Demikian pula dengan hukum acara yang mengatur masing-masing sistem peradilan. Salah satu implikasi penting dari dikotomi tersebut terkait bantuan hukum ialah bagi golongan Eropa dikenal kewajiban *legal representation by a lawyer* baik dalam perkara pidana maupun perdata. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka telah mengenal lembaga yang bersangkutan dalam kultur hukum mereka (di Belanda) dan karenanya cukup diatur dalam undang-undang tentang kekuatan bantuan hukum sebagaimana dikenal di negara-negara maju. Sedangkan pada HIR untuk pribumi dikenal

semacam *legal representation by a lawyer*. Tidak terdapat ketentuan tertentu yang mengatur tentang syarat keahlian agar dapat memberikan bantuan hukum. Jadi, setiap orang boleh membela dirinya sendiri, keluarganya, atau siapa saja (tidak harus seorang pengacara) untuk membantunya di pengadilan.¹² Hal tersebut pada masa penjajahan Belanda dapat dimaklumi karena masih sedikitnya para ahli dan sarjana hukum.¹³

Bantuan hukum berkembang dengan dorongan para advokat Indonesia yang telah berhasil menyelesaikan pendidikannya di Belanda atau di perguruan tinggi hukum di Jakarta. advokat-advokat pada waktu penjajahan sebagian besar adalah orang-orang pergerakan. Kegiatannya juga mempunyai motivasi berkaitan dengan pergerakan nasional. Walaupun pemberian bantuan hukum berkaitan dengan jasa advokat yang bersifat komersial namun karena bantuan hukum tersebut juga memiliki tujuan khusus untuk membantu rakyat Indonesia yang pada umumnya tidak mampu menggunakan jasa advokat-advokat orang Belanda maka hal ini sudah dapat dipandang sebagai titik awal dari pada program bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu.

2) Masa Penjajahan Jepang

Pada masa penjajahan jepang, tidak terlihat adanya kemajuan dari kondisi pada masa penjajahan Belanda. Meskipun peraturan hukum

¹² *Ibid.*, hlm. 1

¹³ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 92

tentang bantuan hukum yang berlaku pada masa belanda seperti RO masih tetap diberlakukan, akan tetapi situasi dan kondisi waktu itu tidak memungkinkan untuk mengembangkan dan memajukan program bantuan hukum di Indonesia.¹⁴

3) Masa Kemerdekaan sampai Sekarang

Pada tahun-tahun awal setelah bangsa Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaan, keadaan bantuan hukum masih sama seperti masa-masa sebelumnya. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum masih berdasarkan HIR sebagaimana berdasarkan pasal 2 aturan peralihan UUD 1945. Bantuan hukum masih belum terorganisir dengan baik (belum terbentuk lembaga khusus).¹⁵ Bangsa Indonesia pada saat itu sedang mengonsentrasikan untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa, demikian pula setelah pengakuan kedaulatan Rakyat Indonesia pada tahun 1950 keadaan yang demikian relatif tidak berubah.

Sekitar tahun 1950-1959, terjadi perubahan sistem peradilan di Indonesia dengan dihapuskannya secara perlahan pluralisme di bidang peradilan. Namun demikian, pemberlakuan yang demikian tetap berimplikasi pada berlakunya sistem peradilan dan peraturan hukum acara warisan kolonial yang ternyata masih tetap sedikit menjamin ketentuan-ketentuan tentang bantuan hukum. Pada periode tersebut yang berada dalam sistem politik demokrasi parlementer, posisi badan

¹⁴ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op.Cit.*, hlm. 14.

¹⁵ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 26

peradilan relatif masih tinggi integritasnya, selain itu, sistem politik yang berlaku masih memungkinkan bagi orang-orang yudikatif untuk lebih bebas dan tidak memihak. Pada sisi lain, control parlemen begitu kuat, dan karenanya campur tangan eksekutif ataupun kekuatan-kekuatan lainnya dalam yudikatif dapat dicegah.¹⁶

Pada masa pemerintahan Soekarno 1959-1965 merupakan saat-saat yang sangat rawan bagi proses penegak hukum. Tampilnya demokrasi terpimpin dalam pentas politik nasional antara lain tidak lepas dari munculnya dominasi peran yang dimainkan oleh presiden Soekarno. Bantuan hukum dan profesi kepengacaraan mengalami penurunan yang luar biasa bersamaan dengan lumpuhnya sendi-sendi hukum. Hukum hanya merupakan alat revolusi, sedangkan peradilan tidak lagi bebas karena terlalu banyak dicampuri dan dipengaruhi secara sadar oleh tangan eksekutif. hakim-hakim berorientasi kepada pemerintah karena tekanan yang dalam praktik dimanifestasikan dalam bentuk setiap putusan dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan pihak kejaksaan. Akibatnya, kebebasan dan kemandirian tidak ada lagi, sehingga dengan sendirinya wibawa pengadilan jatuh, dan harapan serta kepercayaan akan bantuan hukum hilang. Pada saat itu, orang yang berperkara tidak lagi melihat kegunaan dari bantuan hukum demikian pula guna profesi advokat yang memang sudah tidak berperan lagi. Masyarakat lebih memilih meminta pertolongan pada

¹⁶ Bambang Sunggono, dan Aries Harianto, *Op.Cit.*, hlm. 14

jaksa, hakim, atau kepada orang yang berkuasa. Pada saat itu pula, banyak advokat yang meninggalkan profesinya.¹⁷ Puncaknya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

Angin segar dalam sejarah bantuan hukum dimulai pada saat munculnya orde baru. Era orde baru dimulai ketika gagalnya kudeta PKI yang disusul dengan runtuhnya rezim Soekarno. Pada tahun-tahun pertama tampak adanya *drive* yang kuat untuk membangun kembali. Disamping program rehabilitasi dalam bidang ekonomi, terasa juga adanya usaha-usaha untuk menumbuhkan kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan mimbar pada universitas, dan sebagainya. Independensi peradilan mulai dijalankan, dan respek kepada hukum tumbuh kembali. Puncak usaha tersebut ialah dengan digantinya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang kembali menjamin kebebasan peradilan dari segala campur tangan dan pengaruh-pengaruh kekuatan dari luar lainnya dalam segala urusan peradilan.¹⁸

Aspek institusional (kelembagaan) tentang bantuan hukum pernah didirikan di Sekolah Tinggi Hukum (*Rechts Hoge School*) Jakarta pada tahun 1940 oleh Zeylemaker seorang guru besar hukum dagang dan hukum acara perdata, yang melakukan kegiatannya berupa

¹⁷ Frans Hendara Winarta, *Op.Cit.*, hlm. 29

¹⁸ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op.Cit.*, hlm. 15.

pemberian nasehat hukum kepada rakyat yang tidak mampu di samping juga untuk memajukan klinik hukum.¹⁹

Pada tahun 1953 ide untuk mendirikan semacam biro konsultasi hukum muncul kembali, dan pada tahun 1954 didirikan biro Tjandra Naya yang dipimpin oleh Ting Swan Tiong dengan rungan gerak terbatas yang lebih mengutamakan konsultasi hukum bagi orang-orang Cina. Atas usulan Ting Swan Tiong yang disetujui oleh Sujono Hidibroto pada tanggal 2 Mei 1963 didirikan biro konsultasi hukum di universitas Indonesia dengan Ting Swan Tiong sebagai ketuanya. Pada tahun 1968 biro tersebut berganti nama menjadi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH).

Sekitar tahun 1959-1960 para advokat yang berasal dari Jawa Tengah berkumpul di Semarang dan sepakat untuk mendirikan organisasi advokat yang dinamakan *Balie Van Advocaten* (Organisasi/ Kumpulan Advokat) Jawa Tengah. Selanjutnya di beberapa daerah lain mulai bermunculan perkumpulan advokat, seperti balai advokat di Jakarta, Bandung, Medan dan Surabaya. Perkumpulan yang berdiri tersebut belum dalam bentuk satu wadah kesatuan organisasi advokat di Indonesia. Usaha pembentukan kesatuan wadah tersebut telah lama direncanakan semenjak Kongres I perahi (Persatuan Sarjana Hukum Indonesia) tahun 1961 di Yogyakarta. Bertepatan pada berlangsungnya Seminar Hukum Nasional pada tanggal 14 Maret 1963, 14 tokoh

¹⁹ *Ibid.*

advokat yang hadir mencetuskan berdirinya suatu organisasi advokat bernama PAI (Persatuan Advokat Indonesia) yang selanjutnya berubah menjadi Peradin (Persatuan Advokat Indonesia).²⁰

Tahun 1967, Biro Konsultasi Hukum juga didirikan fakultas hukum Universitas Padjajaran. Pada perkembangannya, banyak berkembang fakultas-fakultas hukum di Indonesia yang mendirikan biro-biro atau lembaga-lembaga yang menangani bantuan hukum dengan cakupan pelayanan yang lebih luas artinya tidak sekedar memberi nasehat belaka, akan tetapi juga mewakili dan memberi pembelaan hukum di muka pengadilan. di luar kelembagaan bantuan hukum di fakultas-fakultas hukum, lembaga bantuan hukum yang melakukan aktivitasnya dengan lingkup yang lebih luas dimulai sejak didirikannya lembaga bantuan hukum Jakarta tanggal 28 Oktober 1970 di bawah pimpinan Adnan Buyung Nasution. Lembaga Bantuan Hukum tersebut merupakan wajah lain dari gerakan bantuan hukum di Indonesia karena cirinya yang sangat dinamik. Berkat kesuksesan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, maka gerakan bantuan hukum di Indonesia memasyarakat. Ketika LBH menunjukkan eksistensinya sebagai suatu lembaga mandiri yang memperjuangkan rakyat kecil, maka pendidikan secara cuma-cuma kepada masyarakat pun dimulai.

Bantuan hukum setelah itu berkembang pesat di masyarakat. Namun, di sisi lain, muncul anggapan oleh masyarakat bahwa bantuan

²⁰ Frans Hendra Winarta, *Op.Cit.*, hlm. 29-30

hukum diasosiasikan sebagai belas kasihan bagi fakir miskin. Hal tersebut terungkap melalui konferensi ke-3 *Law Asia* di Jakarta 16-19 Juli 1973. Terdapat kecenderungan umum yang melihat bantuan hukum sebagai bentuk belas kasihan bukan sebagai hak asasi. Hal tersebut merupakan sudut pandang yang sempit karena pada dasarnya, hak untuk dibela oleh advokat dan penasehat hukum adalah suatu hak asasi manusia yang tetap tidak dapat dilepaskan dari *access to legal counsel* dan *equality before the law*.²¹ anggapan tersebut hilang dengan sendirinya dengan eksistensi lembaga bantuan hukum dalam memperjuangkan hak-hak asasi.

Pada masa orde baru, bantuan hukum tumbuh dan berkembang dengan pesat, seperti pada tahun 1979, kurang dari 57 lembaga bantuan hukum yang terlibat dalam program pelayanan hukum kepada masyarakat miskin dan buta hukum. Dewasa ini, jasa bantuan hukum banyak dilakukan oleh organisasi-organisasi bantuan hukum yang tumbuh dari berbagai organisasi profesi maupun organisasi kemasyarakatan. Para penikmat bantuan hukum dapat lebih leluasa dalam upaya mencari keadilan dengan memanfaatkan organisasi-organisasi bantuan hukum tersebut.

Pada era reformasi, komitmen Indonesia menegakkan hak asasi manusia. Hal tersebut ditandainya dengan adanya prinsip-prinsip

²¹ *Ibid.*, hlm. 41.

HAM dalam amandemen pertama UUD 1945.²² Era reformasi telah memberikan peluang bagi proses transformasi dan perubahan struktural segala bidang. Ditandai dengan bergulirnya proses demokratisasi yang semakin tumbuh dan berkembang, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat di berbagai bidang, penghormatan hak asasi manusia, dan sebagainya. Hal tersebut menunjukkan keterbukaan negara terhadap hak warga negaranya termasuk bantuan hukum.²³

Peran serta masyarakat merupakan unsur terpenting terhadap bekerjanya hukum, karena masyarakat akan menjadi sasaran pengaturan hukum tersebut. Segala sesuatu yang akan menjadi hukum dalam masyarakat, yang akan ditentukan dengan sikap, pandangan, dan nilai yang dihayati dalam masyarakat yang bersangkutan.²⁴ Hal tersebut menggambarkan alasan dibalik era reformasi yang memberikan peluang terbuka bagi bantuan hukum.

Pada tahun 1980, mulai terdapat program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Pada awal pelaksanaannya hanya di salurkan melalui Pengadilan Negeri sebagai lembaga satu-satunya dalam penyaluran dana bantuan hukum. Namun sejak tahun anggaran 1994/1995 hingga sekarang, penyaluran dana bantuan hukum

²² LBH Apik Jakarta, *Hak asasi Manusia Kaum Perempuan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hlm. 10.

²³ Marulak Pardede, *Peranan Penelitian Hukum yang Dilaksanakan Oleh Organisasi Bantuan Hukum dalam Mendukung Pembangunan Hukum*, dalam *Rechtsvinding*, (Volume 2, Nomor 1, April 2013), hlm. 127.

²⁴ Salman Manggalatung, *Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959 dan Politik Hukum Islam*, (Jakarta: Focus Grahamedia, 2012), hlm. 22.

disamping melalui Pengadilan Negeri juga dilakukan melalui Lembaga Bantuan Hukum yang tersebar di wilayah hukum Pengadilan Negeri.

Tahun 1999 Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan, selain itu juga telah diundangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pelanggaran HAM yang terjadi pada masa orde lama dan orde baru telah mendorong seluruh komponen bangsa sadar akan pentingnya melindungi hak dasar setiap individu. Perlindungan tersebut juga terkait dengan bantuan hukum yang termasuk pula hak-hak bagi para korban dalam kasus pidana.

Pada tahun 2003 Undang-Undang Advokat telah disahkan. Undang-Undang Advokat tersebut mengakui bantuan hukum sebagai suatu kewajiban advokat, namun tidak mengurangi lebih lanjut apa yang dimaksud dengan bantuan hukum dan bagaimana memperolehnya. Adanya kesemrawutan dalam konsep bantuan hukum dalam bentuk ada kantor-kantor advokat yang mengaku sebagai lembaga bantuan hukum tetapi sebenarnya berpraktik komersial dan memungut *fee* , yang menyimpang dari konsep *pro bono publico* yang sebenarnya merupakan kewajiban dari advokat. Selain kantor advokat mengaku sebagai organisasi bantuan hukum juga ada organisasi bantuan hukum yang berpraktik komersial dengan memungut *fee* untuk pemberian jasa kepada kliennya dan bukan diberikan kepada fakir miskin secara *pro bono publico*. Kesemrawutan pemberian bantuan hukum yang terjadi selama ini adalah karena belum adanya konsep bantuan hukum yang

jelas. Mengatasi kesemrawutan tersebut perlu dibentuk suatu undang-undang bantuan hukum yang mengatur secara jelas, tegas dan terperinci mengenai apa fungsi bantuan hukum, organisasi bantuan hukum, tata cara untuk memperoleh bantuan hukum, siapa yang memberikan, siapa yang berhak memperoleh bantuan hukum, dan kewajiban Negara untuk menyediakan dana bantuan hukum sebagai tanggung jawab konstitusional. Keberadaan undang-undang bantuan hukum digunakan untuk merekayasa masyarakat fakir miskin agar mengetahui hak-hak nya dan mengetahui cara memperoleh bantuan hukum.

Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan.²⁵ profesi tersebut tetap memiliki tugas dalam memberi pertolongan kepada masyarakat seperti bantuan hukum, sebagaimana tercantum dalam kode etik Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pasal 7 point h, bahwa advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) bagi orang yang tidak mampu.

Tahun 2003, advokat yang tergabung dalam delapan organisasi hanya berkisar 0,007% dari keseluruhan penduduk Indonesia. Delapan

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 175.

organisasi yang dimaksud ialah Ikatan Advokasi Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Profesi hukum di Indonesia terpengaruh pula dengan tradisi sistem *civil law*. Tradisi tersebut menganggap area profesi hukum adalah khas dan membutuhkan pendidikan atau pelatihan tersendiri.²⁶

Penjaminan hak konstitusional bagi setiap warga Negara yang mencakup perlindungan hukum, kepastian hukum, persamaan di depan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, pada tanggal 04 Oktober 2011 Pemerintah dan DPR telah menyetujui bersama undang-undang yang mengatur bantuan hukum yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pengaturan mengenai bantuan hukum di Indonesia pada dasarnya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebelum secara khusus diatur pada tahun 2011. Kehadiran Undang-Undang Bantuan Hukum menjawab ekspektasi yang tinggi dari masyarakat terhadap penyelesaian persoalan bantuan hukum di Indonesia. Undang-Undang Bantuan Hukum memberi ruang bagi setiap daerah untuk mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum. Banyak organisasi bantuan hukum yang tersebar di

²⁶ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 119.

Indonesia menerima dana dari pemerintah untuk menghidupkan undang-undang tersebut dengan berbagai program yang mereka miliki.

Setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum berlaku, tahun 2012 dianggap sebagai peralihan pengelolaan bantuan hukum yang semula berada dalam wewenang Mahkamah Agung menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Pada 8 Desember 2011, Menteri hukum dan HAM telah mengirimkan surat No. M.HH.UM.01.01-75 tentang Masa Transisi Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Ketua Mahkamah Agung.²⁷

Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang mana selama ini bantuan hukum hanya disebut pada beberapa pasal dalam regulasi-regulasi sebelumnya. Proses transisi menuju implementasi undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 pada akhirnya secara difinitif menetapkan bahwa undang-undang tersebut hanya akan terbatas pada pemberian jasa hukum, sesuai dengan definisi yang diatur oleh Pasal 1 Undang-Undang Bantuan Hukum. Sementara itu, pemberian jasa lain yang sebelumnya merupakan lingkup dari pelaksanaan bantuan hukum pada pengadilan, yang meliputi pembebasan biaya perkara/prodeo, sidang keliling, dan posbakum masih merupakan kewenangan pengadilan, yang artinya masih perlu dianggarkan dan dianggarkan pada tahun 2013.

²⁷ Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2013*, (2013), hlm. 64.

Berdasarkan masalah tersebut, Menteri Hukum dan HAM telah mengirimkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 29 Desember 2012 Nomor M.HH.UM.01.01-55 tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan yang berisi :

- a) Konfirmasi kewenangan Mahkamah Agung terhadap posbakum dan oleh karenanya posbakum bisa berjalan seperti biasa.
- b) Bahwa seluruh permohonan bantuan jasa advokat terhitung 1 Januari 2013 dapat diteruskan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang relevan.

Surat tersebut sayangnya keluar sudah sangat terlambat, ketika pembahasan anggaran tahun 2013 sudah final. Akibatnya perlu dilakukan relokasi anggaran yang pastinya akan memakan waktu beberapa bulan. Sehingga tahun 2013 tantangan terbesar adalah memastikan bahwa dukungan anggaran dan kelangsungan tiga jenis layanan bantuan hukum, yaitu pembebasan biaya perkara/prodeo, sidang keliling, dan pos bantuan hukum dapat tetap terjamin.²⁸

Program penyediaan posbakum di pengadilan dan pemberian bantuan jasa advokat pada tahun 2013 tidak dapat dijalankan. Hal tersebut terjadi karena proses transisi peralihan pengelolaan dana bantuan hukum antara Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhumham) dengan Mahkamah Agung RI tidak berjalan mulus

²⁸ Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2012, (2013)*, hlm. 29.

menyusul diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-Undang ini mengamankan pengelolaan dana bantuan hukum oleh Kemenhumham RI Kinerja bantuan hukum terutama yang terkait dengan Posbakum di pengadilan tidak sesuai harapan pada tahun 2013. Ketiadaan anggaran untuk posbakum merupakan salah satu sebabnya. Layanan Posbakum di pengadilan hanya sebatas *advice* dan konsultasi hukum. Namun apabila diperlukan, pengadilan dapat memberikan informasi mengenai daftar advokat dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang dapat memberi pendampingan litigasi. Penyedia layanan dalam hal ini ialah dari universitas. pengadilan tidak membayar layanan *advice* dan konsultasi hukum dari OBH yang telah terverifikasi oleh kemenhumham.²⁹

3. Tujuan Bantuan Hukum

Keadilan yang merupakan suatu kebutuhan pokok manusia yang didambakan setiap orang, baik yang kaya maupun yang miskin. Namun, kadangkala kekayaan bagi si kaya mempermudahnya memperoleh keadilan dengan menguasai mekanisme berjalannya hukum, sehingga hal tersebut dapat menindas masyarakat miskin. Maka, diperlukan adanya pemerataan keadilan yang dapat diimplementasikan secara merata bagi semua lapisan masyarakat. Berpijak dari pemikiran tersebut, dalam praktek dan implementasi

²⁹ Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2013*, Op.Cit., hlm. 79.

bantuan hukum di Indonesia baik konsep bantuan hukum individual maupun struktural yang tumbuh dan berkembang terutama kalangan lembaga bantuan hukum.³⁰

Akses pada keadilan adalah bagian tak terpisahkan dari ciri lain Negara hukum yaitu bahwa hukum harus transparan dan dapat diakses oleh semua orang, sebagaimana diakui dalam perkembangan pemikiran kontemporer tentang Negara hukum. Jika seorang warga Negara karena alasan finansial tidak memiliki akses demikian maka adalah kewajiban Negara, dan sesungguhnya juga kewajiban para advokat untuk memfasilitasinya, bukan justru menutupinya.

Secara umum, tujuan dari bantuan hukum ialah membantu klien dalam memperoleh hak-haknya dalam proses penegakan hukum, baik litigasi maupun nonlitigasi. Selain itu, bantuan hukum memiliki tujuan *access to justice* bagi setiap anggota masyarakat.³¹ Adapun tujuan dari bantuan hukum tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Bantuan Hukum, yakni:

- 1) Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan
- 2) Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum
- 3) Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia

³⁰ Bambang Sunggono, dan Aries Harianto, *Op.Cit.*, hlm. 62.

³¹ Didi Kusnadi, *Op.Cit.*, hlm. 82.

- 4) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Guna memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi beberapa persyaratan, persyaratan tersebut meliputi:

- 1) Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
- 2) Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- 3) Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Penerima bantuan hukum memiliki hak-hak tertentu akan bantuan hukum, *pertama*, penerima bantuan hukum mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa. *Kedua*, penerima bantuan hukum mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat. *Ketiga*, penerima bantuan hukum juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Hak Fakir Miskin untuk Mendapatkan Bantuan Hukum

Tidak banyak orang yang tahu bahwa bantuan hukum adalah bagian dari profesi advokat. Profesi advokat dikenal sebagai profesi

yang mulia atau *officium nobile* karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial ekonomi, kaya atau miskin, keyakinan, politik, gender, dan ideology.³² Delapan dari sepuluh orang Indonesia kalau ditanya tentang bantuan hukum tidak dapat membedakannya dengan profesi advokat. Namun, keharusan membela fakir miskin dalam profesi advokat sejalan dengan prinsip *justice for all* membuat profesi hukum yang satu ini populer di masyarakat internasional, tetapi tidak demikian halnya di Indonesia. Keruntuhan wibawa hukum dan wibawa pengadilan di dekade 1980-an dan 1990-an turut memengaruhi citra advokat yang dituduh sebagai “calo perkara” dan komersial. Tuduhan ini ada benarnya kalau dilihat bagaimana pembangunan ekonomi dijadikan titik sentral dari pembangunan rezim Orde Baru, bahwa ukuran sukses adalah dari segi material dan finansial saja dengan melupakan aspek moral, budaya, dan hukum. Bagaimana keberhasilan ekonomi dicapai tidak dipersoalkan apakah itu sah atau tidak menurut hukum. Ternyata keberhasilan ekonomi yang digemborkan sebagai legitimasi Orde Baru menjadi salah ketika krisis moneter pada bulan Juli 1997 melanda Indonesia berkepanjangan dan disusul krisis di bidang politik dan bidang lainnya. Korupsi merajalela di mana-mana, bukan saja di sektor birokrasi, melainkan sudah melanda sektor swasta dan malahan perusahaan asing atau patungan.

³² Frans Hendra, *Op.Cit.*, hlm 106.

Akibatnya, hukum tidak berkuasa atau tidak mempunyai otoritas lagi dan tidak ditaati masyarakat. Supremasi hukum hanya menjadi slogan belaka.³³

Kewajiban membela orang miskin bagi profesi advokat tidak lepas dari prinsip persamaan di hadapan hukum dan hak untuk didampingi advokat atau penasihat hukum untuk semua orang tanpa kecuali. Profesi hukum hanya dapat ditujukan kepada para lulusan pendidikan tinggi fakultas hukum yang menjalankan profesi dalam masyarakat. Mereka adalah sarjana-sarjana hukum yang dianggap menjalankan keahliannya dengan standar tinggi, seperti advokat atau lebih luas penasihat hukum (konsultan hukum) ataupun jaksa dan hakim. Tidak termasuk di dalamnya sarjana hukum yang menjadi dosen ataupun polisi.³⁴ Pembelaan terhadap fakir miskin mutlak diperlukan dalam suasana sistem hukum pidana yang belum mencapai titik keterpaduan (*Integrated Criminal Justice System*). Sering kali tersangka yang miskin karena tidak tahu hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa disiksan, diperlakukan tidak adil, atau dihambat haknya untuk didampingi advokat. Polisi belum bekerja menerapkan *Due Process Model* yang memperhatikan hak-hak tersangka sejak ditangkap. Ia dianggap tidak bersalah sampai nanti dibuktikan oleh putusan pengadilan yang bebas dan mempunyai ketetapan hukum oleh pengadilan yang bebas dan impersial (*independent and impartial*

³³ *Op.Cit.*, hlm 107.

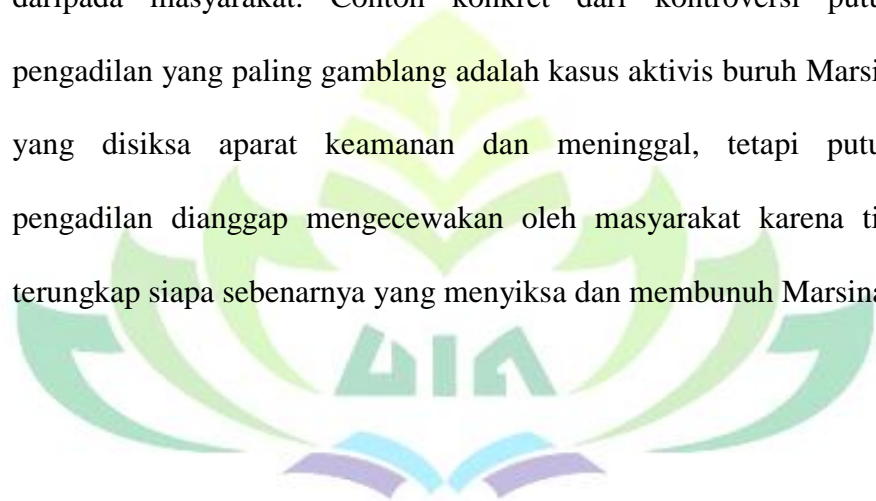
³⁴ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Buku Ketiga, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia), hlm. 78.

Judiciary), jujur, dan terbuka. Polisi masih cenderung menggunakan *crime Control Model*, belum tercapainya sistem peradilan yang *independent* dan *imparsial* telah menyebabkan sistem peradilan pidana di Indonesia tidak berfungsi maksimal. putusan-putusan pengadilan banyak yang kontroversial dan kurang pertimbangan hukumnya. Sebelum adanya Undang-Undang No. 35 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebabkan hakim tidak bebas dan tidak *imparsial* apalagi jaksa dan polisi belum bisa bekerja sama secara harmonis karena hambatan, sejarah, dan status. Pada zaman H.I.R. polisi adalah pembantu jaksa dalam memperoleh bukti, sekarang dalam KUHAP jaksa dan polisi disejajarkan kedudukannya yang menimbulkan friksi-friksi di antara mereka.

Masyarakat miskin yang rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang rendah tidak cukup dapat membela dan mendapatkan haknya di dalam proses persidangan tanpa pendampingan penasehat hukum. Tak mungkin dapat diharapkan putusan yang adil dari proses persidangan yang berjalan timpang. Bisa dikatakan bahwa tidak ada putusan yang adil tanpa proses yang adil pula. Hadirnya penasihat hukum menjadikan penyeimbang (*equal arm*) antara dua posisi yang berat sebelah tersebut. Maksud dari semua itu adalah agar kebebasan dan

hak-hak yang dimiliki oleh tersangka, terdakwa, terpidana dan saksi selama dalam proses terpenuhi atau setidaknya ada. Oleh sebab itu meskipun bantuan hukum hanya merupakan sub sistem kecil dari sistem peradilan tetapi peranannya begitu besar dalam terbentuk putusan yang memberikan kebenaran materiil kepada terdakwa secara khusus dan kepada masyarakat secara umum.

Pengadilan cenderung lebih memihak kepada pemerintah daripada masyarakat. Contoh konkret dari kontroversi putusan pengadilan yang paling gamblang adalah kasus aktivis buruh Marsinah yang disiksa aparat keamanan dan meninggal, tetapi putusan pengadilan dianggap mengecewakan oleh masyarakat karena tidak terungkap siapa sebenarnya yang menyiksa dan membunuh Marsinah.



BAB IV

PENTINGNYA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN KONSTITUSIONAL FAKIR MISKIN

A. Analisis Pola Hukum Positif Mengenai Pentingnya Pemberian Bantuan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Konstitusional bagi Fakir Miskin

Problematika yang mencuat ke permukaan yang sering dihadapi oleh kaum miskin adalah akses terhadap keadilan (*access to justice*). Terutama bagi mereka yang sedang berhadapan atau bermasalah dengan hukum. Inilah salah satu dimensi kemiskinan dari sisi yang lain, dimana akses terhadap keadilanpun mereka minim, lalu bagaimana mereka bisa mendapatkan perlakuan yang adil dalam peradilan. Meski Negara dalam persoalan hukum telah menetapkan proses hukum yang adil (*due process of law*), akan tetapi praktiknya tidaklah sesederhana yang ada dalam asas hukum tersebut. Masih ada pihak-pihak yang menginginkan agar proses hukum itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, baik dari aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, dan advokat) maupun dari orang miskin itu sendiri.

Pemberian bantuan hukum merupakan sarana penunjang bagi penegakan hukum pada umumnya dan usaha perlindungan hak-hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum merupakan bagian komponen struktur hukum, sehingga betapapun sempurnanya substansi hukum tanpa penegak hukum, maka tidak ada manfaatnya dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan. Bantuan

hukum merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan karena merupakan bagian dari perlindungan HAM, khususnya terhadap hak atas kebebasan dan hak atas jiwa raga tersangka atau terdakwa.

Akses keadilan merupakan salah satu hak dasar yang bersifat universal, yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu dan termarginalisasi, agar mereka dapat menggunakan sistem hukum untuk meningkatkan hidupnya. Karena itu pengalaman di berbagai Negara dalam memberikan bantuan hukum bagi warga Negara yang tergolong miskin atau tidak mampu adalah relevan dalam mewujudkan Negara hukum yang demokratis. Hal ini tentu berlaku bagi Negara Republik Indonesia yang juga merupakan Negara hukum yang demokratis.

Dalam Negara hukum (*rechtsstaat*), Negara jelas mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Dan bantuan hukum bagi fakir miskin merupakan jawaban atas asas persamaan di hadapan hukum yang perlu diatur dalam undang-undang.

Suatu Negara hukum (*rechtsstaat*) baru tercipta apabila terdapat pengakuan terhadap demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Dalam negara hukum, Negara dan individu berada dalam kedudukan yang sejajar (*on equal footing*), kekuasaan Negara dibatasi oleh hak asasi manusia agar tidak melanggar hak-hak individu. Jaminan hak asasi manusia diperlukan dalam rangka melindungi serta mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh Negara terhadap warganya.

Persamaan di hadapan hukum dan hak untuk dibela advokat adalah hal yang perlu dijamin dalam rangka pencapaian keadilan sosial, juga sebagai salah satu cara mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum. Kenyataan tidak semua warga Negara mampu menggunakan jasa advokat guna membela kepentingan mereka dalam memperoleh keadilan. Hal ini disebabkan sebagian besar anggota masyarakat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan dan kurangnya pengetahuan akan hukum ditambah lagi dengan rendahnya budaya hukum dengan tingkat kesadaran hukum. Pelaksanaan bantuan hukum sangat diperlukan untuk menjamin dan mewujudkan persamaan di hadapan hukum bagi setiap orang terutama fakir miskin.

Untuk mewujudkan terselenggaranya negara hukum (*konstitusionalisme*) tersebut, maka negara perlu campur tangan karena hal itu menjadi kewajiban Negara untuk menjamin hak setiap orang mendapatkan keadilan. Dengan kata lain, Negara harus menjamin terselenggaranya bantuan hukum kepada orang miskin atau orang tidak mampu sehingga tidak ada yang luput dari akses keadilan yang merupakan amanat konstitusi.

Hak atas bantuan hukum termasuk pula sebagai hak asasi manusia. Bantuan hukum berkembang tidak hanya dalam konteks pembelaan korban pelanggaran hak-hak sipil dan politik, melainkan juga menjadi salah satu metode dalam promosi dan pembelaan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Keadilan merupakan asas hukum yang paling utama, disamping kemanfaatan dan kepastian hukum. Hakikat dari keadilan adalah milik semua manusia. Hal ini sesuai dengan makna dari prinsip dasar di dunia, yaitu persamaan di hadapan hukum, tanpa membedakan hukum bagi setiap manusia. Jadi tidak peduli si kaya atau si miskin, tidak peduli strata sosialnya, tidak peduli apa jabatannya, semuanya sama kedudukannya di hadapan hukum. Namun dalam prakteknya, sering kali teori keadilan ini tidak terwujud terutama pada pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat miskin. Hal ini dapat dilihat dari adanya ungkapan bahwa penegakan hukum ibarat sebilah pisau "*tajam ke bawah, tumpul ke atas*" dan disamping itu bagi rakyat miskin, keadilan hukum itu merupakan suatu barang yang mahal.

Masalah bantuan hukum sesungguhnya adalah masalah klasik, masyarakat miskin telah lama berharap akan adanya suatu proses peradilan yang adil yang dapat diakses oleh setiap warga Negara, dengan adanya pengaturan pemberian bantuan hukum secara konkret, yang dapat mengakomodir kepentingan hak-hak tersangka / terdakwa dalam proses pemeriksaan. Tetapi aturan yang lahir adalah aturan yang lemah baik aturan maupun penegakannya, sehingga tidak memiliki arti penting dalam mewujudkan pemenuhan hak asasi warga Negara / tersangka untuk dapat memperoleh peradilan yang adil dan akses kepada keadilan.

Demikian pula dipermasalahan hukum perdata di mana sering kali terjadi kasus-kasus *civil deprived Rights* yang dilakukan oleh penguasa

yang sewenang-wenang merampas hak-hak sipil warga Negara. Hadirnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan aturan mengenai bantuan hukum ternyata belum banyak membantu pemenuhan hak asasi warga Negara khususnya kepada tersangka, hal ini terbukti masih banyaknya kasus-kasus pidana yang diproses tanpa adanya bantuan dari penasihat hukum / advokat, sehingga tidak jarang banyak masyarakat menjadi pasrah ketika hak-haknya ditindas dan diberikan putusan yang tidak adil oleh lembaga peradilan.

Hak atas peradilan yang adil (*fair trial rights*) merupakan suatu hak untuk mendapatkan perlindungan dari pembatasan hak secara sewenang-wenang atau perampasan hak asasi dan kemerdekaan setiap manusia. Hak untuk mendapatkan peradilan yang adil (*fair trial rights*), berhak didapatkan oleh tersangka / tertuduh sejak dimulainya proses penanganan / pemeriksaan oleh pihak kepolisian atas tuduhan terhadap tersangka sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Hak untuk mendapatkan peradilan yang adil adalah hak bagi setiap tersangka sebagai warga Negara. Untuk dapat menuju terwujudnya suatu peradilan yang adil, maka kepada tersangka / terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum yang bertujuan untuk melindungi tersangka dari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam proses hukum, berupa pelanggaran hak-hak tersangka, pemaksaan, dan kesewenang-wenangan. Bantuan hukum merupakan suatu kewajiban yang wajib diberikan kepada setiap warga Negara khususnya tersangka

dalam perkara pidana pada setiap proses pemeriksaan, yang bertujuan untuk mewujudkan adanya suatu sistem peradilan pidana yang dijalankan dengan menghormati hak-hak konstitusional dan asasi setiap warga Negara dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Salah satu aspek penting lainnya dalam bantuan hukum adalah dalam segi pendanaan. Kondisi finansial sangat penting dalam menentukan pengembangan program bantuan hukum. Anggapan keliru yang tersebar luas adalah bahwa seolah-olah segala urusan tentang bantuan hukum bagi fakir miskin, termasuk dukungan finansial, dapat diserahkan kepada organisasi bantuan hukum itu sendiri. Sesungguhnya, bantuan hukum adalah tanggung jawab Negara. Jika Negara mengabaikan tugas konstitusionalnya untuk membiayai gerakan bantuan hukum dan tidak mengalokasikan anggaran tertentu dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), itu artinya Negara tidak memenuhi kewajibannya untuk melindungi fakir miskin.

Pemberian bantuan hukum sebagai kewajiban Negara untuk memenuhi hak konstitusional fakir miskin adalah dengan menyediakan dana kepada pemberi bantuan hukum melalui APBN. Karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum mengambil konsep bantuan hukum model kesejahteraan. Pemberian bantuan hukum sebagai kewajiban Negara untuk memenuhi hak konstitusional fakir miskin diperluas di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dengan melibatkan tidak hanya advokat, tetapi juga

paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Hal ini karna bantuan hukum konstitusional diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Dengan demikian pencari keadilan yang tidak mampu atau miskin harus mendapatkan bantuan hukum dalam proses hukum untuk mendapatkan keadilan. Pemerintah perlu melakukan verifikasi, seleksi, dan evaluasi, serta memberikan akreditasi bagi lembaga pemberi bantuan hukum yang memenuhi atau tidak memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum.

Inilah salah satu problema yang dihadapi oleh kaum miskin untuk mendapatkan *access to justice*. Advokat mesti memiliki asas *pro bono publico*, serta kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang untuk menolong kaum miskin, akan tetapi dalam praktiknya tidak mudah untuk mewujudkannya. Negara mencoba mengatasi dengan mengeluarkan undang-undang tentang bantuan hukum, Keluarnya Undang-Undang Bantuan Hukum No.16 Tahun 2011, sekaligus menunjukan bahwa memperoleh bantuan hukum bagi rakyat memang tidak gratis meski biaya itu ditanggung oleh negara. Bantuan hukum cuma-cuma akhirnya hanya sekedar mitos belaka. Persoalan tidak berhenti pada hal tersebut, karena untuk mencairkan dana bantuan hukum bukanlah proses yang mudah juga. Ada prosedur dan birokrasi yang tidak dipahami oleh para advokat untuk mengakses dana itu. Artinya, terdapat beberapa masalah yang mendasar terhadap diberikannya bantuan hukum oleh negara kepada kaum miskin atau kaum marjinal.

Pelaksanaan bantuan hukum sangat diperlukan untuk menjamin dan mewujudkan persamaan dihadapan hukum bagi setiap orang terutama fakir miskin. Hal ini juga dimaksudkan guna terciptanya prinsip "*fair trial*" dimana bantuan hukum yang dilaksanakan oleh seorang advokat dalam rangka proses penyelesaian suatu perkara, baik dari tahap penyidikan maupun pada proses persidangan, amat penting guna menjamin terlaksananya proses hukum yang sesuai dengan aturan yang ada, terlebih lagi ketika ia mewakili kliennya dalam beracara di persidangan untuk memberikan argumentasi hukum guna membela kliennya.

Pelaksanaan bantuan hukum sebenarnya terasa betul ketika anggota masyarakat masuk ke dalam suatu rangkaian proses hukum dimana ia berhak mendapatkan pembelaan dari advokat untuk menjamin tercapainya proses hukum yang adil (*due process of law*) dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak individu oleh Negara ketika ia berhadapan dengan kepentingan Negara dalam suatu perkara hukum, atau ketika ia berhadapan dengan instrumen-instrumen Negara yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dalam proses peradilan. Karena itu perlu adanya jaminan Negara bagi warga negaranya untuk mendapatkan bantuan hukum, yang salah satunya dapat diberikan dalam peraturan perundang-undangan.

Masyarakat yang tidak mampu dan awam akan hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan prosedural. Baik dalam

permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak pengadilan padahal bisa jadi hanya tidak memenuhi prosedural hukum.

Dalam konteks inilah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin, khususnya dalam pembuatan surat gugatan/permohonan, perkara prodeo dan sidang keliling diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-undang dan rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat termarginalkan terhadap pengadilan.

Agar bantuan hukum dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat, pelaksanaannya perlu dilakukan secara merata dengan penyaluran melalui lembaga institusi penegak hukum yang ada seperti pengadilan, kejaksaan, organisasi advokat, maupun organisasi masyarakat yang bergerak di bidang bantuan hukum.

Pada tataran normatif, diperlukan adanya pengaturan khusus yang sifatnya memfasilitasi pelaksanaan bantuan hukum. Melihat kebutuhan akan keberadaan Undang-Undang ini dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan maka sebaiknya pembuatan Undang-Undang bantuan hukum tidak dilihat dari perspektif pelaksanaan bantuan hukum, melainkan dari kacamata masyarakat yang membutuhkannya sehingga diharapkan materi pengaturan yang tercakup di dalamnya akan tepat pada sasaran yang dituju.

Pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan advokat

dalam setiap proses hukum melainkan lebih jauh dari hal itu yaitu bagaimana menjadikan masyarakat mengerti hukum dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada. Pengakuan Negara harus diwujudkan bagi partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum. Kemudian memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat, serta peran advokat ikut serta dalam menunjang terwujudnya persamaan diantara masyarakat.

Kelangsungan pelaksanaan bantuan hukum tidak lepas dari peran penasihat hukum/advokat, dengan adanya pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh penasihat hukum, maka suatu proses persidangan akan berjalan dengan seimbang (*audi et alteram partem*), oleh karena para pihak dapat memberikan pendapatnya secara bebas dan proporsional, sehingga suatu peradilan yang adil dapat terwujud.

B. Analisis Pandangan Hukum Islam mengenai Pola yang digunakan Hukum Positif dalam Mewujudkan Keadilan Konstitusional bagi Fakir Miskin dengan Bantuan Hukum

Al-Qur'an maupun al-hadis yang berkaitan dengan tolong menolong, mencerminkan salah satu dasar adanya bantuan hukum. Bantuan hukum dalam istilah literatur hukum Islam disebut dengan *al-muhamy* yang berarti membela, mempertahankan, melindungi. Hal tersebut dikarenakan istilah bantuan hukum yang terkait dengan profesi advokat.

Pelaksanaan bantuan hukum dalam Islam sendiri tentu di sandarkan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum Islam yang

bersumber pada Al-Qur'an dan sunnah, maka bantuan hukum dan kepengacaraan dalam proses penegakan hukum dalam Islam hendaknya ditunjukan untuk keadilan, kebaikan dan kemaslahatan umat manusia itu sendiri.

. Bantuan hukum dalam Islam dapat disebut sebagai jasa hukum yang diberikan untuk menegakkan hukum dan keadilan oleh seorang ahli hukum (pengacara) dalam menyelesaikan perkara klien, baik diluar maupun di dalam pengadilan. Bantuan hukum dalam hukum Islam tidak sesederhana seperti dipahami dalam konteks barat, yaitu jasa hukum cuma-cuma (prodeo), melainkan seseorang yang bertugas menegakan hukum dan keadilan.

Keadilan hukum dalam Islam bersumber dari Tuhan yang Maha Adil, karena pada hakikatnya Allah-lah yang menegakan keadilan (*qaiman bil qisth*), maka harus diyakini bahwa Allah tidak berlaku aniaya (zalim) kepada hamba-hamba-Nya. Oleh karena itu setiap perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan kepada-Nya pada hari keadilan. (Q.S An-Nisaa' : 110).

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١١٠﴾

Artinya:

“Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(Q.S An-Nisaa' : 110).

Bantuan hukum telah banyak terjadi setelah kedatangan Islam. Wakalah sebagai salah satu bentuk bantuan hukum, telah dipraktekan pada masa nabi Musa. Akibat memakan bara api ke mulutnya, berdampak pada kekakuan lidahnya, sehingga ia membutuhkan nabi Harun sebagai juru bicaranya. Nabi Musa meminta bantuan kepada nabi Harun untuk mendampingi dan membela serta melindungi beliau dari kejahatan pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Nabi Musa menganggap Nabi Harun lebih pandai berbicara sehingga mampu mengedepankan argumentasi secara sistematis dan logis. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebelum datangnya Islam, telah dikenal konsep pembelaan atau kuasa hukum untuk mengungkap kebenaran di depan pengadilan.

Pada masa Nabi Muhammad, pelaksanaan bantuan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum seperti *hakam*, *mufi*, dan sebagainya. Seperti dalam hadis-hadis yang membahas tentang masalah yang ditanyakan kepada Nabi saw untuk diberikan solusi. Hingga pada perkembangan selanjutnya, para *Fuqoha* mengkonsepsikan terkait bantuan hukum (pembelaan) tersebut dalam bentuk yang lebih dinamis dan komprehensif ke dalam sistem *wakalah* (perwakilan). Sistem *wakalah* di pengadilan banyak kemiripan dengan sistem kepengacaraan.

Bantuan hukum dalam hukum Islam pun berasal dari teori persamaan hak hukum manusia sebagaimana pada hukum positif, persamaan hak hukum manusia dalam Islam yang didasarkan pada teori kehormatan manusia (*al-fitrāh*). Secara alami dan hakiki setiap orang

memiliki hak untuk bebas dalam harkat dan martabat. Teori tersebut dikemukakan oleh *al-Maududi* dalam *Human Right in Islam* bahwa secara fitrah setiap orang terlahir dalam keadaan bebas dan sama dalam harkat dan martabat.

Manusia memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama, untuk mewujudkan keadilan adalah mutlak mempersamakan manusia dihadapan hukum. Bahkan kerjasama internasional sulit dilaksanakan apabila tidak di dalam kesederajatan antar negara dan antar bangsa. Demikian pula setiap manusia adalah subjek hukum, penanggung hak dan kewajiban yang sama. Semangat dari Al-Qur'an dan Hadis serta perilaku para sahabat yang membebaskan budak adalah untuk mewujudkan persamaan kemanusiaan ini. Karena perbudakan menunjukan adanya ketidaksederajatan kemanusiaan. Hak hidup dan hak memiliki dan kehormatan kemanusiaan harus sama-sama dihormati dan dilindungi, satu-satunya ukuran kelebihan manusia terhadap manusia lainnya adalah ketakwaannya. Adapun perbedaan-perbedaan di antara manusia adalah perbedaan tugas dan posisi serta fungsi masing-masing di dalam kiprah kehidupan manusia di dunia ini, dapat disimpulkan bahwa *Al-ashlu fi al-Insaniyah al-Musawah*, yang berarti "hukum asal di dalam kemanusiaan adalah sama". Dengan demikian jelas bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama, meskipun berbeda ras, suku, agama, dan memiliki hak yang sama pula untuk mendapatkan bantuan hukum bagi fakir miskin.

Islam telah membuat dasar-dasar sistem politik musyawarah yang menerapkan prinsip persamaan sebelum Barat mengenalnya dan menyebutkannya dalam Perundang-Undangan sejak lebih dari 14 abad silam. Syariat Islam berbeda dengan yang lainnya dalam menetapkan persamaan hak secara mutlak yang diputuskan kecuali sesuai dengan keadilan. Maka tidak ada ikatan dan tidak ada pengecualian. Persamaan hak adalah persamaan yang sempurna antara individu rakyat.

Menyelesaikan perkara bukanlah hal yang mudah, orang yang berurusan dengan hukum namun tidak memahami hukum akan sangat kesulitan sehingga adanya bantuan hukum akan dapat memenuhi kebutuhannya. *Kemaslahatan* bagi manusia yang dipenuhi oleh tujuan dari bantuan hukum tersebut meliputi kebutuhan *daruriyyat* dan kebutuhan *hajiyyat*. Pemberi bantuan hukum merupakan kebutuhan *hajiyyat* dikarenakan tidak semua orang memiliki kebutuhan akan bantuan hukum dari lembaga tersebut, seperti dalam faktanya, masyarakat hanya membutuhkan lembaga tersebut jika sedang mengalami masalah hukum. Namun, kebutuhan akan bantuan hukum merupakan kebutuhan *daruriyyat*, terutama ketika terjadi masalah hukum.

Bantuan hukum yang diperoleh dalam menyelesaikan perkara oleh penerima bantuan hukum merupakan *masalah daruriyyat* bagi mereka. Pelaksanaan teknis dalam pemberian bantuan hukum Islam dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh Negara itu sendiri. Negara Indonesia menganut trikotomi sistem hukum yaitu hukum Islam, hukum barat, dan

hukum adat, maka sistem hukum yang paling dominan diterapkan disuatu Negara mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat khususnya bantuan hukum dalam Islam.

Berbagai penyelesaian perkara yang ditempuh, tetap membutuhkan bantuan hukum. Penyelesaian perkara baik litigasi maupun non litigasi merupakan sarana akan kebutuhan akses setiap warga Negara atas keadilan dan kesamaan di hadapan hukum yang merupakan jaminan dari Negara Indonesia. Hukum yang ada tersebut tidak akan berjalan dan berlaku dengan sendirinya . pembelaan yang diperoleh melalui bantuan hukum merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar bagi setiap orang yang meliputi berbagai aspek dalam memperoleh keadilan. Melaksanakan dan memelihara keadilan di bumi merupakan prasyarat bagi kebahagiaan manusia. Hal tersebut merupakan sebab gagasan keadilan sedemikian kuat dalam Al-Quran. Kehidupan yang adil, bebas konflik, dan masing-masing orang mendapatkan hak nya merupakan dambaan setiap manusia. Kondisi kehidupan masyarakat tersebut akan terwujud dengan terlaksananya bantuan hukum dengan baik di tengah masyarakat.

Adil dalam pengertian persamaan (*equality*), yaitu persamaan dalam hak, tanpa membedakan siapa, darimana orang yang akan diberikan sesuatu keputusan oleh orang yang diserahkan menegakan keadilan.

Dalam prinsip keadilan hukum ini Nabi SAW menegaskan adanya persamaan mutlak dihadapan hukum-hukum syariat. Keadilan dalam hal ini tidak membedakan status sosial seseorang, apakah ia kaya atau miskin,

pejabat atau rakyat jelata, dan tidak pula karena perbedaan warna kulit serta perbedaan bangsa dan agama, karena di hadapan hukum semuanya sama.

Pengakuan adanya persamaan, bahkan dalam Al-Qur'an dinyatakan sebagai pemberian Allah yang mempunyai implikasi terhadap tingkah laku manusia, dan merupakan bagian dari sifat kemuliaan manusia (*al-karamah al-insaniyah*), yang juga bagian dari ketetapan Tuhan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi. Berdasarkan uraian dari bab ke bab yang telah dipaparkan, dapat diambil kesimpulan berikut:

1. Pola hukum positif dalam mewujudkan keadilan konstitusioanl bagi fakir miskin adalah:
 - a. Pemerintah menyediakan akses bagi fakir miskin yang menuntut keadilan untuk mendapatkan bantuan hukum agar terjamin hak-hak konstitusional fakir miskin tersebut dalam proses hukum.
 - b. Fakir miskin dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
2. Pola hukum positif dalam mewujudkan keadilan konstitusional sudah sesuai degan hukum Islam. Pada ketentuan hukum Islam mengajarkan setiap pemeluknya agar melindungi hak-hak setiap individu, bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama serta adanya kewajiban dalam menegakkan hukum dan keadilan setiap individu. Ketentuan tersebut merupakan dasar yang paling fundamental bagi adanya bantuan hukum dalam proses penegakan hukum dalam Islam.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah diutarakan dalam skripsi ini, penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran sebagai berikut: Pada dasarnya Indonesia mengakui hak asasi tiap manusia sebagaimana didalam peraturan perundang-undangan maupun UUD 1945 tidak membedakan antara kaya dan miskin dan menjamin keadilan bagi seluruh warga Negara. Indonesia selaku Negara hukum Indonesia harus mampu mewujudkan pula terselenggaranya negara hukum (*konstitutionalisme*) tersebut, maka negara perlu campur tangan dalam penengangan pemberian bantuan hukum bagi fakir miskin karena hal itu menjadi kewajiban Negara untuk menjamin hak setiap orang mendapatkan keadilan. Dengan kata lain, Negara harus menjamin terselenggaranya bantuan hukum kepada orang miskin atau orang tidak mampu sehingga tidak ada yang luput dari akses keadilan yang merupakan amanat konstitusi. Harus adanya pula sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai bantuan hukum terhadap seluruh masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui hak mendapat bantuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab, Buku, Kamus

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Abdurahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Cendana Press, 1983.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2009.
- Amirudin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Baharuddin Lopa, *Al-Quran dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial: Pandangan Dentologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern*, Jakarta: Gramedia, 1990.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Histori*, Bandung: Nuansa dan Nusa Media, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Cardob internasional Indonesia.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Surabaya: Laksbang Yustisia, 2010.

Farid Abdul Khalid, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005.

Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia hak untuk didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara*, Jakarta: PT Gramedia, 2010.

Harun Nasution, *Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.

Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Al I'Tisom, 2008.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

John Rawls, 2005, *Teori Keadilan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005

Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995.

Kartini Katono, *Pengantar Teknologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.

LBH Apik Jakarta, *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mi'abah*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.

Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI*, 2013.

Mardjono Reksodimutro, *Hak Asasi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2013.

Marulak Pardede, *Peranan Penelitian Hukum yang dilaksanakan Oleh Organisasi Bantuan Hukum dalam Mendukung Pembangunan Hukum*, Jakarta: Gramedia, 2013.

Metro Kusumo, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press 2007.

Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist*, Delhi: Markaz Maktabah Islamiyah, 1985.

Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Penada Media, 2004.

Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 2002.

Ranny Kautun, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Bandung: Taruna Grafika, 2000.

Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Roupan Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, Jakarta: PT Grasindo, 2003.

Salman Manggalatung, *Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959 dan Politik Hukum Islam*, Jakarta: Focus Grahamedia, 2012.

Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2009.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985.

Sugiono, *Memahami Pengertian Kualitatif*, Bandung: Alfabet, 2009.

Susiadi, AS. *Metodelogi Penelitian*, Bandar Lampung: LP2M IAIN RADEN INTAN.

A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

C. Internet

Indra Maley “Sejarah Sosial Bantuan Hukum”, (On-Line), tersedia di:
<https://indramaley.wordpress.com/2016/01/01/sejarah-sosial-bantuan-hukum-dalam-islam/>. (14 Agustus 2017)

Muhammad Ali Al-Hasyimi, *Keadilan dan Persamaan dalam Masyarakat Muslim*, https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_articles/chain/Masyarakat_Muslim/id_07_masyarakat_muslim.pdf, 26 Oktober 2017

www.suduthukum.com/2017/01/bantuan-hukum-menurut-islam.html. diakses pada 28/07/2017 jam 18:48.

<https://al-badar.net/pengertian-hukum-rukun-dan-syarat-wakalah/> diakses pada 13/08/2017 pukul 16:40

<https://www.google.co.id/search?dcr=0source-hpq-pesan-keadilan-sosial-doq-pesan-keadilan-sosial> diakses pada 08/09/2017 jam 21:48.

